Laporan Penelitian

# MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN UNIT PRODUKSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


Oleh :

Drs. Martubi, M.Pd.
Drs. Satunggalno, M.Pd.



Penelitian ini Dibeayai oleh Proyek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 39 / P2IPT / DPPM / 98 / LITMUD / V / 1998

Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA



1998



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN UNIT PRODUKSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Drs. Martubi, M.Pd., dkk.

Penelitian ini berutjuan untuk mengetahui: (1) Informasi/data tentang kondisi pelaksanaan Unit Produksi (UP) di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) saat ini, dan (2) Model-model UP yang ideal sesuai potensi dan kondisi SMK dan daya dukung lingkungannya, sehingga UP dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tempat pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan, yang direncanakan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan, yaitu menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan tentang pengembangan UP SMK di Indonesia. Populasi penelitian ini dibatasi pada SMK bidang teknologi dan industri, yaitu SMK Negeri tiga tahun yang meliputi SMK N Sleman, Wonosari, Bantul, Kulon Proo dan BLPT Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Potret pelaksanaan Unit Produksi di SMK: (a) pemahaman warga sekolah tentang UP masih kurang dan sosialisasinya belum sampai pada tingkatan yang diharapkan, (b) kegiatan UP belum direncanakan dengan baik, masih berjalan secara incidental, (c) hambatan dominan yang muncul adalah dari faktor SDM yang kurang professional sebagai pengusaha, (d) Model-model penyelenggaran UP di sekolah anatar: model badan usaha milik sekolah yang berdiri sendiri tetapi masih terikat dengan sekolah, dan berdasarkan jenis usahanya adalah manufacturing dengan modelreguler, pesanan dan sub kontrak, sedangkan untuk jenis usaha jasa yang banyak dilakukan adalah model latihan dan maintenance service; (e) dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya dalam hal dasar hokum, badan hokum, analisa usaha, fasilitas, manajemen, keterlibatan dunia usaha/masyarakat, modal dan pemasaran. Kedua, Visi unit produksi di SMK masa mendataang: (a) penyelenggaraan UP di SMK adalah model replika industri yang keudukannya ada dan sejajar dengan sekolah, (b) jenis usahanya meliputi produksi dan jasa; Jenis produksi dapat bersifat reguler, produksi standar, dan pesanan/order; (c) fasilitas yang digunakan meliputi perangkat keras dan lunak untuk kepentingan produksi dasar sampai yang canggih, (d) SDM menggunakan para ahli/profesional dalam bidang pekerjaan usahanya, jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan jenis dan kapasitas usahanya, (e) program PSG akan efisien dan sangat ditunjang dengan model UP yang dikelola mandiri dan professional.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## KATA PENGANTAR

Program kegiatan Unit Produksi di SMK merupakan salah satu usaha sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan lulusannya, baik pengetahuan maupun keterampilannya. Disamping itu dengan pelaksanaan Unit Produksi yang baik akan membantu tercapainya program Pendidikan Sistem Ganda.

Penelitian dengan judul: "Model-Model Penyelenggaraan Unit Produksi di Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta" ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan Unit Produksi di Sekolah Menengah Kejuruan.

Bekaitan dengan telah terlaksananya penelitian ini, maka kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, selanjutnya kami juga menucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya kepada:

1. Bapak Rektor IKIP Yogyakarta.
2. Bapak Dekan FPTK IKIP Yogyakarta.
3. Bapak/Ibu staf pimpinan dan karyawan Kanwil dan Kandep Depdikbud di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMK Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu pimpinan dan karyawan SMK Mikael Surakarta.
6. Bapak/Ibu/Saudara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua fihak yang berkepentingan, khususnya dalam mengembangkan Unit Produksi di SMK, sumbang dan saran yang konstruktif kami harapkan demi sempurnanya laporan ini.

Yogyakarta, Desember 1998
Tim Peneliti

Drs. Martubi, M.Pd.
Drs. Satunggalno, M.Pd.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## DAFTAR ISI


Halaman Judul ..... i

Abstrak ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 2

C. Batasan Masalah ..... 4

D. Rumusan Masalah ..... 5

E. Tujuan, Hasil, dan Manfaat Penelitian ..... 6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA ..... 8

A. Kebijakan Pendidikan Kejuruan ..... 8

B. Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan saat ini ..... 13

C. Dasar-dasar Kebijakan Pendidikan Menengah Kejuruan Masa Datang ..... 16

D. Dasar-dasar, Pertimbangan, dan Acuan Menentukan Visi SMK ..... 17

E. Visi Kegiatan Unit Produksi di SMK yang akan Datang ..... 24

F. Kerangka Berfikir ..... 31

G. Pertanyaan Penelitian ..... 33

BAB III. METODE PENELITIAN 34

A. Pendekatan Penelitian ..... 34

B. Populasi dan Sampel ..... 34

C. Metode Pengumpulan Data ..... 35

D. Batasan Variabel Penelitian 35

E. Instumen Penelitian ..... 36

F. Penetapan Visi UP di SMK Mendatang ..... 36

G. Teknik Analisis Data dan Langkah-langkahnya ..... 37




Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Potret Pelaksanaan Unit Produksi di STM ..... 38
B. Visi Unit Produksi ..... 45

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN..... 63
A. Simpulan ..... 63
B. Saran Kebijakan ..... 64

DAFTAR PUSTAKA ..... 66
LAMPIRAN – LAMPIRAN ..... 68



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Ditinjau dari keluaran pendidikan yang dihasilkan, di Indonesia masih terdapat 77 % tenaga kerja tidak terampil, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, baik yang ada di lembaga pendidikan maupun di dunia kerja. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah: perencanaan pendidikan dan tenaga kerja secara nasional kurang sesuai, belum adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan industri, perkembangan IPTEK yang sangat cepat, serta sikap dan etos kerja SDM Indoensia yang rendah. Dengan kata lain, masih terdapat *mislink and mismatch* antara misi dunia pendidikan dengan dunia kerja (Wardiman Djojonegoro, 1993).

Akibat adanya *mislink and mismatch* tersebut apabila tidak segera diatasi maka dunia pendidikan hanya akan menghasilkan SDM yang menganggur, sementara di lain pihak dunia industri akan makin sulit memperoleh tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan profesional. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu segera dipecahkan dalam rangka menuju negara industri di masa datang.

Demikian pula halnya, kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri, ternyata masih banyak mengalami hambatan. Melihat gejala yang demikian, maka akhir-akhir ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan *link and match*, yaitu usaha menumbuhkan dan menciptakan keterkaitan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0490/U/1992 menyebutkan bahwa untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja yang trampil, di SMK dapat didirikan Unit Produksi atau disingkat UP (termasuk di dalamnya adalah Sekolah Teknologi Menengah atau STM), yang beroperasi secara profesional. Penyelenggaraan UP diharapkan dapat lebih mening-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

katkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu sekolah. Dengan melaksanakan UP diharapkan dapat dicapai kesesuaian kualifikasi atau kualitas antara SMK dengan kebutuhan dunia kerja.

Agar proses restrukturisasi dan rekulturisasi, kaitannya dengan pelaksanaan UP di SMK (dalam hal ini STM) dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dilakukan penelitian yang komprehensif mengenai potret atau kondisi UP di STM saat ini dan visi mengenai UP yang akan datang. Oleh karena itu, dipandang sangat esensial untuk meneliti pola-pola atau bentuk-bentuk pelaksanaan UP yang dilaksanakan oleh SMK, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk pelaksanaan UP yang bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan di SMK, khususnya STM.

## B. Identifikasi Masalah

Upaya pemerintah untuk mewujudkan tamatan STM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif telah banyak dilakukan. Namun demikian sampai sekarang masih lebih banyak dalam tingkatan kebijakan, sedangkan pada taraf implementasinya masih mengalami banyak permasalahan.

Kebijakan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan salah satu wujud upaya tersebut, dimana sampai sekarang juga baru sebagian kecil SMK umumnya atau STM pada khususnya yang bisa melaksanakan dengan baik. Sedangkan sebagian besar masih mengalami banyak kendala, baik ditinjau dari perencanaan sampai dengan pengawasan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam program tersebut belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan.

Kebijakan lainnya adalah kegiatan Unit Produksi (UP) di SMK umumnya atau STM pada khususnya. Kegiatan usaha di sekolah ini justru lebih banyak kendalanya apabila dibandingkan dengan program PSG. Beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan program UP di STM antara lain:



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Tingkat perencanaan usaha di sekolah belum dilakukan sebagaimana mestinya usaha profesional seperti di dunia usaha/industri. Keberadaan UP di STM masih bersifat apa adanya, sebatas sebagai sampingan warga sekolah, sekedar memanfaatkan sebagian fasilitas yang ada, tanpa di dukung oleh SDM yang profesional. Lebih jauh dari itu tingkat pemahaman dan pemasyarakat UP di sekolah oleh warganya belum menggembirakan (Otjo, 1994).
2. Secara keseluruhan, pelaksanaan UP di STM sampai sekarang baru sebagian kecil di Indonesia yang mampu menyelenggarakan. Kebanyakan mereka adalah pada jenis STM yang swasta murni. Hal ini disebabkan mereka memiliki otonomi sendiri untuk mengembangkan usaha di sekolah, di samping didukung oleh kemampuan yayasan atau lainnya untuk melakukan usaha secara profesional di STM. Sedangkan STM negeri memiliki karakteristik yang berbeda dengan swasta tersebut, sehingga pelaksanaan UP masih memprihatinkan.
3. Melihat kecenderungan masa depan di Indonesia menghadapi era industrialisasi dan globalisasi, maka diharapkan kegiatan UP di STM mampu mendukung peningkatan kemampuan lulusan memiliki ketrampilan tinggi. Sementara itu berbagai kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan suasana kondusif untuk UP di STM belum banyak. Di lain pihak keterlibatan dunia usaha/industri dalam memikirkan program UP di STM untuk masa datang juga belum terwujud. Sehingga timbul masalah pokok terkait dengan harapan UP di masa datang ini adalah bagaimanakah sebaiknya usaha di sekolah (UP) untuk masa datang dilakukan?.
4. Permasalahan lainnya adalah berbagai cara atau strategi yang diterapkan oleh sekolah/pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan UP sekarang ini menjadi yang lebih baik di masa datang belum banyak dilakukan (Slamet PH, 1995). Terdapat dua hal pokok yang mendasari dalam permasalahan strategi ini, yaitu adanya restrukturisasi dan rekulturisasi pendidikan (dalam pengertian UP) di STM (Slamet PH, 1995). Kedua permasalahan ini sampai sekarang belum dapat dipecahkan sebagaimana mestinya, sehingga

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kegiatan UP di STM belum berjalan secara profesional. Restrukturisasi berhubungan dengan penerapan sistem pendidikan (khusus sistem UP) yang mengarah pada strukturisasi perusahaan/industri seperti yang sebenarnya. Sedangkan rekulturisasi mengarah pada pembentukan dan perubahan perilaku serta sikap warga sekolah dari "guru minded" menjadi *bisnisman* atau usahawan.

## C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka untuk melakukan pemecahannya memerlukan adanya keberanian pemerintah untuk melakukan perombakan kebijakan di bidang SMK, khususnya STM, sehingga kegiatan UP dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu, perlu keterlibatan dunia usaha/industri untuk mewujudkannya. Demikian pula sangat diperlukan usaha-usaha kajian dan penelitian yang mendalam terhadap berbagai permasalahan tersebut, khususnya oleh kalangan perguruan tinggi atau instansi lain terkait untuk mengungkap permasalahan di lapangan serta mencari jalan keluarnya, sehingga dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam rangka menghidupkan kegiatan UP di STM.

Sedangkan dalam penelitian ini permaslahan yang akan diteliti dibatasi pada penelitian tentang potret pelaksanaan Unit Produksi di STM dan visi penyelenggaraan UP di masa datang; belum sampai mengarah pada penelitian strategi pengembangan untuk mengangkat dari kondisi sekarang ke arah masa datang yang lebih baik. Khusus tentang visi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah difokuskan penelitiannya pada pencarian model UP di masa datang yang dapat diterapkan di STM, dengan tidak menutup kemungkinan berbagai hal/komponen juga diteliti yang ada hubungannya dengan visi UP.

Di samping itu, oleh karena permasalahan strategi pengembangan UP sampai sekarang ini masih sangat ditentukan oleh pembuat keputusan (dalam hal ini pemerintah), bukan dari kalangan ilmuwan atau peneliti, maka permasa-



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lahan startegi ini juga tidak ikut dilibatkan dalam penelitian.

Dikaitkan dengan obyek permasalahan, maka dalam penelitian ini juga dibatasi hanya pada SMK Bidang Teknologi dan Industri, yaitu STM.

Dasar pertimbangan dari berbagai pembatasan tersebut adalah karena keterbatasan waktu dan biaya yang ada dalam penelitian ini.

## D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka dalam penelitian ini dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seperti apakah kondisi/potret pelaksanaan Unit Produksi (UP) di STM saat ini? Dalam hal ini dapat dirinci dalam masalah-masalah:
   a. Seberapa besar tingkat pemahaman warga sekolah di STM terhadap UP?
   b. Seberapa jauh usaha pemasyarakatn UP di STM?
   c. Bagaimanakah UP direncanakan?
   d. Bagaimanakah model-model UP yang dilakasanakan?
   e. Apa sajakah hamabatan yang dialami dalam pelaksanaan UP?
   f. Apakah memiliki dasar dan berbadan hukum dalam melaksanakan UP?
   g. Sejauhmana fasilitas dimiliki sekolah untuk melaksankan UP?
   h. Bagaimanakah pengelolaan UP dilakukan?
   i. Bagaimanakah kerjasama sekolah (UP) dengan pihak lain?
   j. Bagaimanakah pengelolaan sumber daya manusia dalam kegiatan UP?
   k. Sejauhmana modal diupayakan untuk operasionalisasi UP?

2. Seperti apakah visi UP di STM masa mendatang?
   Dalam hal ini dapat dirinci dalam masalah-masalah:
   a. Apakah dasar hukum yang dipergunakan?
   b. Apa saja jenis usaha yang dapat dijalankan?
   c. Apakah tujuan dan manfaat UP?



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

d. Seperti apa model penyelenggaraan UP?

e. Bagaimanakah struktur organisasi dan job diskripsi pengelolaan UP?

f. Seperti apakah SDM yang menangani?

g. Seperti apakah sarana dan pra sarana yang dibutuhkan?

h. Bagaimanakah bentuk pemasaran dilakukan?

i. Bagaimanakah keterkaitan UP dengan program PSG?

## E. Tujuan, Hasil dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui/memperoleh:

1. Informasi/data tentang kondisi pelaksanaan UP di STM saat ini.
2. Model-model UP yang ideal sesuai potensi dan kondisi STM dan daya dukung lingkungannya, sehingga UP dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tempat pelaksanaan PSG

**Hasil** penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Informasi/data yang akurat tentang kondisi pelaksanaan UP di STM saat ini
2. Pedoman tentang model-model UP di STM yang sesuai dengan program studi atau bidang keahlian yang dipelajari, potensi sekolah, dan daya dukung masyarakat (termasuk konsumen).

Hasil penelitian ini sangat **berguna** bagi Sekolah, Kanwil Depdikbud, Dikmenjur, dunia usaha/industri, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

### 1. Bagi Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian ini, Sekolah akan mengetahui sejauhmana kualitas pelaksanaan UP saat ini, terutama menyangkut berbagai komponen pelaksanaan UP yang masih kurang baik, dimana selanjutnya sekolah dapat mengembangkan pelaksanaan UP-nya dengan lebih jelas dan akurat.

### 2. Bagi Kanwil Dekdikbud

Berdasarkan temuan penelitian ini, Kanwil Depdikbud dapat mengetahui



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sejauhmana keberhasilan pelaksanaan UP di sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Kanwil dapat dengan lebih mudah dalam mengkoordinasi dan mengarahkan serta mengembangkan pelaksaan UP di SMK, terutama pada komponen-komponen pelaksanaan UP yang belum memadai. Dengan demikian, hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi Kanwil dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan UP di SMK-SMK yang ada di wilayahnya.

**3. Bagi Ditmenjur**

Ditmenjur dapat memperoleh informasi/data yang akurat tentang berbagai ragam bentuk pelaksanaan UP di SMK, termasuk masing-masing kelemahan dan keunggulannya. Secara umum juga dapat diketahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan UP di STM. Dengan demikian, Ditmenjur dapat dengan lebih mudah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan UP di SMK yang disesuaikan dengan potensi sekolah dan daya dukung lingkungannya.

**4. Bagi Dunia Usaha/Industri**

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi dunia usaha/ industri, terutama dalam menentukan bentuk dan isi serta mekanisme kerjasama dengan STM untuk UP. Dengan demikian dunia usaha dapat mengetahui dengan lebih akurat peran apa yang seharusnya dilakukan dan manfaat apa yang dapat diperolehnya.

**5. Bagi Pihak-pihak lain**

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan, Bank dan lain-lainnya akan mengetahui dengan pasti masa depan pelaksanaan UP yang cukup prospektif, dan mengetahui peran apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pihak Bank, Departemen Koperasi dan Perdagangan akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pendanaan dan perniagaan untuk kegiatan UP di SMK.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Munculnya kebijakan-kebijakan (*policy*) adalah produk dari para *policy maker*, yang sangat erat kaitannya dengan filosofi dan prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman membuat kebijakan pendidikan. Menurut Miller (1986) kebijakan (*policy*) didefinisikan sebagai : "*.....aset of expectations to be met in the conduct of vocational education*". Lebih dari itu kebijakan adalah sejumlah harapan yang dapat dilaksanakan, dibuat dan diambil dari lembaga pemerintah yang di atas maupun bawah dalam rangka mengatur pelaksanaan pendidikan kejuruan. Kebijakan adalah peraturan (*law*) untuk memberikan kemudahan bagi para praktisi dalam mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Secara hirarki filosofi melahirkan beberapa prinsip, dan prinsip akhirnya akan diwujudkan ke dalam beberapa kebijakan. Dengan demikian para praktisi pendidikan dalam membuat kebijakan harus mengetahui landasan filosofinya, begitu pula pedoman yang dipergunakan diambil dari prinsip-prinsip yang ada. Sehingga kebijakan yang timbul tidak boleh bertentangan dengan prinsipnya maupun terhadap filosofinya.

Di atas telah disebutkan bahwa filosofi merupakan kerangka kerja konsep yaitu suatu cara memandang pendidikan kejuruan. Dikatakan oleh Miller (1986) : *"policy is the medium necessary for philosophy and principles to become operable"*. Dengan demikian antara ketiganya harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan.

Lebih lanjut dikatkan oleh Wenrich (1974) bahwa kebijakan pendidikan kejuruan dimaksudkan sebagai formulasi rencana dan tujuan yang dikembangkan atas dasar implikasi pendidikan kejuruan di luar lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Campbell dkk (1971) bahwa formulasi kebijakan pendidikan kejuruan didasarkan pada keadaan sosial, ekonomi, politik, dan



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

perkembangan IPTEK. Oleh karena itu para pengambil kebijakan pendidikan kejuruan menurut Slamet PH (1990) perlu mempertimbangkan adanya: (a) institusi/personil yang terlibat, seperti Depdikbud, Bappenas, Depnaker, Deprind, Depdag, dan organisasi lain; (b) program yang dikembangkan harus berkarakteristik berkualitas tinggi, adaptip, relevansi, link and match, daya transfer tinggi, menumbuhkan daya nalar tinggi; dan (c) kekuatan atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan kejuruan.

Adapun beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia diuraikan di bawah ini.

**1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989**

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989 adalah merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan yang disebut dengan sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional (psl 1 ayat 3 UUSPN No. 2 Tahun 1989).

Ada bermacam-macam jenis pendidikan di Indonesia, seperti tercantum dalam Bab IV pasal 11 ayat 1 UUSPN disebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar sekolah, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Khusus mengenai perbedaan antara pendidikan umum dan kejuruan adalah bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan


Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan (pasal 11 ayat 2). Sedangkan pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu (pasal 11 ayat 3).

Pada pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan (pasal 15 ayat 2) adalah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi (pasal 15 ayat 1).

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, dapat memberikan keleluasan khususnya pendidikan menengah kejuruan di masa yang akan datang. Disebutkan dalam pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 1990 bahwa yang dimaksud dengan pendidikan menengah kejuruan ialah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Tujuan PMK adalah mengutamakan penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional (pasal 3). Bentuk satuan pendidikan menengah kejuruan adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) (pasal 4). Syarat utama SMK adalah: sekurang-kurangnya dua puluh orang, terdiri satu orang guru untuk satu mata pelajaran, kurikulum, sumber dana, tempat belajar, dan buku serta alat pendidikan (pasal 6).

Kemudian untuk menetukan **peringkat** sekolah melalui akreditasi, sekolah dinilai secara keseluruhan baik mengenai kemampuan pengelolaan maupun kegiatan pendidikannya. Penilaian yang dimaksud menurut pasal 23 ayat 2 meliputi: kelembagaan, kurikulum, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lainnya, sarana dan prasarana, admnisitrasi, dan keadaan umum SMK yang bersangkutan.

Dalam penentuan **peringkat** sekolah diadakan perbedaan antara SMK yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau **karakteristik** tertentu.

### 3. Keputusan Mendikbud Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sebagai pendidikan menengah, maka SMK berdasarkan kebijakan pemerintah memiliki beberapa karakteristik yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik yang bersifat sebagai pedoman dalam kebijakan ini dimuat dalam berbagai pasal. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan

Dalam pasal 6 ayat 2 keputusan ini disebutkan bahwa pengelolaan SMK meliputi: peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, kegiatan belajar mengajar, sarana, prasarana, dan administrasi.

2) Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3)

BP3 ini merupakan suatui badan pembantu penyelenggaraan pendidikan di SMK yang dibentuk terdiri guru, wali peserta didik, dan tokoh masyarakat (pasal 10).

3) Tenaga Kependidikan

Khusus mengenai tenaga kependidikan disebutkan dalam pasal 20 ayat 2 adalah terdiri dari kepala sekolah dan

wakil, wali kelas, ketua jurusan, guru mata pelajaran, guru praktek, ketua rumpun, guru pembimbing, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan kepala instalasi.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4) Kurikulum

Kurikulum SMK diorganisasikan ke dalam komponen yang bersifat: normatip, yaitu berperan dalam membentuk watak manusia Indonesia, adaptip yaitu berperan dalam penanaman dasar dan pengembangan kemampuan profesi; dan produktif yaitu berperan dalam pembekalan ketrampilan produktif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (pasal 21).

5) Bimbingan Kejuruan

Pada SMK berlaku dua macam bimbingan, yaitu bersifat umum dan bimbingan karir kejuruan (pasal 25).

6) Unit Produksi

Setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan unit produksi yang (pasal 29), bertujuan meningkatkan kualitas lulusan dan kemampuan tenaga kependidikan, serta untuk menambah modal pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

7) Kerjasama dengan Dunia Kerja

SMK dapat mengusahakan kerjasama dengan dunia kerja untuk meningkatkan kesesuaian program dengan kebutuhan dunia kerja dengan azas saling menguntungkan (pasal 32).

8) Sarana dan prasarana

SMK wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung dan perabotan serta prasarana lain sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 42).

Kemudian menurut pasal 34, dalam hal penentuan peringkat, suatu SMK diberikan penilaian (akreditasi) yang bertujuan untuk: (1) mengetahui **mutu** dan **kemampuan pengelolaan** pendidikan di sekolah; (2) menetapkan **peringkat** sekolah berdasarkan **mutu**; (3) memberikan informasi kepada masyarakat tentang **mutu pendidikan sekolah** tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa standar atau tolok ukur suatu sekolah adalah **mutu pendidikan**nya.

Adapun hal-hal yang diakreditasi menurut pasal 35 adalah meliputi: legalitas kelembagaan, organisasi dan managemen, kurikulum, guru dan



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tenaga kependidikan lainnya, siswa dan tamatan, sarana dan prasarana; keuangan sekolah; kerjasama sekolah dan dunia kerja; unit produksi; penampilan sekolah dari segi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan; serta administrasi sekolah.

### 4. Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum SMK

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, merupakan penyempurnaan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEK, kesenian, masyarakat serta kebutuhan pembangunan. Dimana keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Kepres Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali mengalami perubahan (tentang Kurikulum 1984).

Isi Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 ini berisi tentang : (1) Lampiran I: Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum SMK, (2) lampiran II: GBPP SMK, dan (3) Lampiran III: Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMK.

## B. Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Saat ini.

Seperti disebutkan dalam Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan bahwa secara garis besar tujuan SMK adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat memasuki lapangan kerja, bersikap profesional, mampu mengembangkan diri, kreatif, adaptif, produktif serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja baik masa sekarang maupun yang akan datang.

Menurut Slamet PH (1995) pendidikan di SMK secara sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

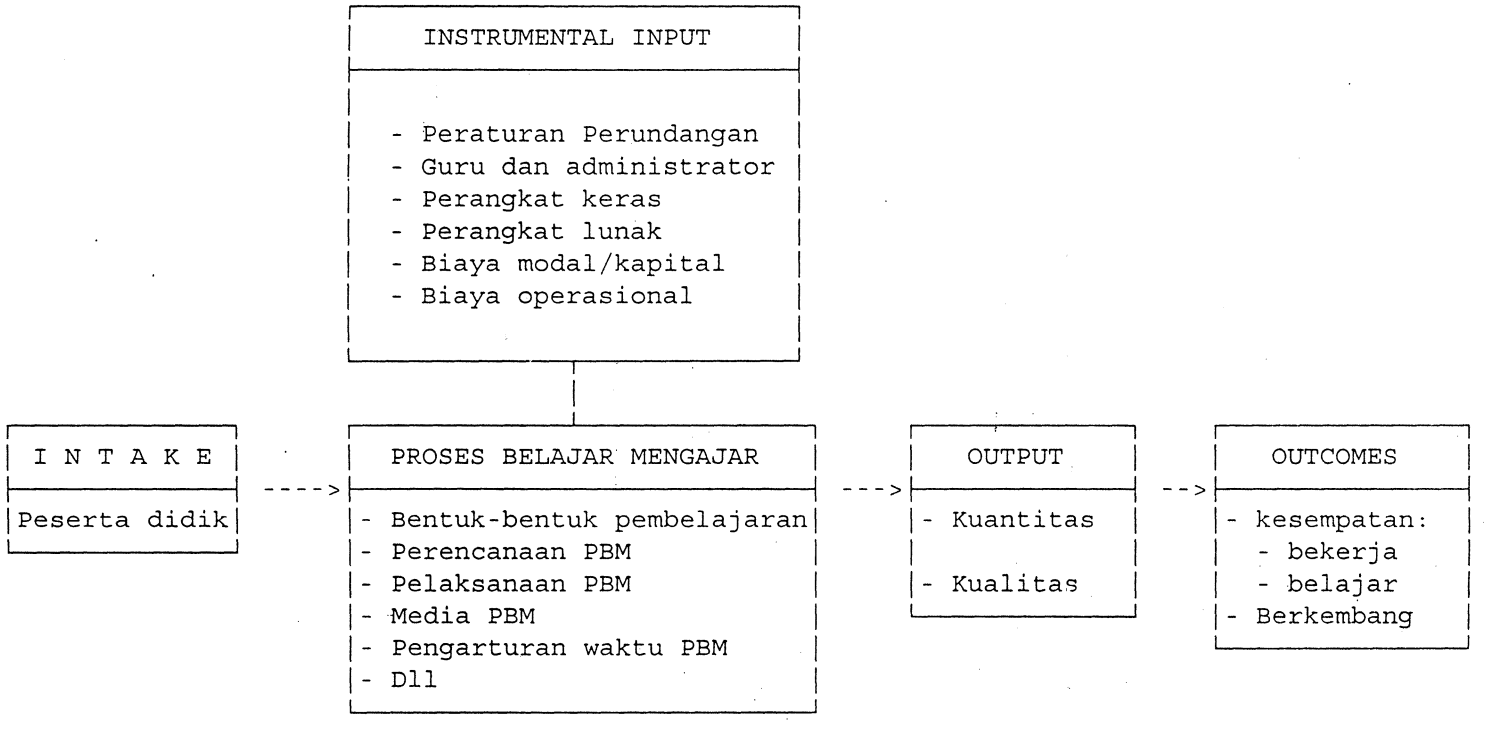


Gambar 1. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Untuk mencapai atau menciptakan SMK yang baik seperti yang diharapkan di atas, menurut Slamet PH (1995) diperlukan adanya masukan (peserta didik) yang berkualifikasi baik dengan melibatkan dunia industri untuk penyaringannya. Di samping itu, secara ideal terpenuhinya *instrumental input* yang memadai seperti kebutuhan akan tenaga kependidikan, pra sarana, sarana, fasilitas dan peralatan, bahan, serta aspek-aspek legal yang mendukung PBM.

Bilamana input maupun instrumentalnya terpenuhi dengan baik, maka akan mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dengan baik pula. Namun demikian dalam hal ini sangat diperlukan antara lain semangat, dedikasi, profesionalitas, dan kemampuan, bagi semua tenaga kependidikan dalam menciptakan dan melaksanakan "suasana kerja" (yaitu PBM) sesuai dengan karakteristik sekolah yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai hasil-hasil pendidikan yang diharapkan dari SMK, menurut Slamet PH (1995) menghadapi masa mendatang dimana dunia kerja atau industri makin menuntut adanya kualifikasi lulusan SMK yang makin terampil, adaptif, kreatif, dan bahkan mampu berwiraswasta, maka penyelenggaraan pendidikan di SMK harus meyesuaikan, yaitu mampu berusaha menerapkan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan di SMK.

Untuk masa yang akan datang tolok ukur keberhasilan pendidikan di SMK adalah dilihat dari sisi outcomesnya (seperti kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang lebih tinggi serta kemampuan berkembang setelah bekerja untuk meningkatkan karier dan pengetahuannya), bukan lagi hanya dipandang dari keluaran (output) saja. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan di SMK diperlukan perangkat peraturan dan kebijakan pendukung dan sekaligus menciptakan situasi pendidikan yang mampu mengantisipasi masa depan. Peraturan atau kebijakan yang dimaksud seperti UUSPN, PP Nomor 29 Tahun 1990, Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992, Kepmendikbud Nomor 080/U/1993, Pedoman Pelaksanaan Sistem Ganda, dan lain-lain. Dengan beberapa pedoman dan kebijakan tersebut antara lain tujuannya adalah dapat menciptakan lulusan seperti yang dikemukakan di atas.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## C. Dasar-Dasar Kebijakan Pendidikan Menengah Kejuruan Masa Datang

Pendidikan menengah kejuruan adalah satu-satunya dari sistem pendidikan di sekolah yang secara khusus disiapkan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil tingkat menengah untuk mengisi keperluan dunia usaha, industri, dan pembangunan.

Menghadapi kecenderungan pasar terbuka yang membawa konsekuensi persaingan makin taham, pendidikan menengah kejuruan berada pada posisi strategis ikut menciptakan SDM yang memiliki keahlian dan epenguasaan IPTEK yang akan mendukung keunggulan dunia usaha dan industri, yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (Dikmenjur, 1993).

Dalam menghadapi era tinggal landas di masa datang, maka sistem pendidikan menengah kejuruan dituntut handal (reliable) mengemban fungsi dan peranan seperti tersebut di atas. Meurut Depdikbud (1993). Dalam perkembangan kemudian, perlu adanya keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan dan pembangunan makin dirasakan karena beberapa kecenderungan, diantaranya:

1. makin tingginya tuntutan dunia kerja yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
2. perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang makin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisi pliner
3. kecenderungan umum dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya perubahan cara berfikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, menyangkut pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilannya yang fungsional bagi kehidupannya sebagai pribadi, warga negara, warga masyarakat, serta usahanya mencari nafkah.
4. makin populernya konsep pengembangan SDM yang mendapatkan tekanan kuat pada awal PJP II. Dalam hal ini pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Melihat perkembangan secara global seperti tersebut, serta perkembangan dunia pendidikan khususnya, maka pada PJP II ini dikeluarkan kebijakan *link and match*.

Menurut Slamet PH (1995), keluarnya kebijakan tersebut lebih didasarkan adanya tuntutan pendidikan (bahkan bisa disebut sebagai suatu pergeseran dalam pendidikan kejuruan) yang menekankan adanya sistem pendidikan kejuruan yang efisien, merata, relevansi, berkualitas dan sarat nilai output maupun outcome-nya. Oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan tersebut, kebijakan *link and match* dipandang sangat tepat untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha/industri di masa datang.

Secara yuridis, menurut Depdikbud (1993) kebijakan *link and match* didasarkan pada tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam GBHN 1993. Dimana dalam tujuan tersebut terkandung tiga dimensi tujuan, yaitu: (a) perkembangan pribadi peserta didik, (b) pembinaan peserta didik agar menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik, dan (c) penyiapan peserta didik untuk memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang fungsional bagi kehidupan pribadinya, masyarakatnya dan bangsanya.

## D. Dasar-Dasar, Pertimbangan, dan Acuan Menentukan Visi SMK

Untuk menentukan visi pendidikan kejuruan, khususnya Sekolah menengah Kejuruan (SMK), maka diperlukan beberapa hal sebagai dasar atau pertimbangannya, yaitu: (a) tantangan-tantangan global masa depan, (b) Sumber Daya Manusia (SDM)yang diharapkan di masa datang, dan (c) pengalaman pendidikan kejuruan di negara lain.

### 1. Tantangan Masa Depan

Di samping philosofi, maka tantangan masa depan juga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan pendidikan. Dengan



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengetahui kondisi masa depan secara global, maka dalam merencanakan suatu pendidikan beserta segala konsekuensinya, maka akan dihasilkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Tantangan masa depan yang ditandai era global dan era informasi membuka peluang kerja sama dan sekaligus persaingan yang semakin ketat. Di samping itu, era perdagangan bebas negara-negara ASEAN (AFTA) yang akan berlaku mulai tahun 2003 menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di sisi lain, Industri di Indonesia tidak dapat bertahan lagi dengan mengandalkan upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif. Oleh karena itu, peran pendidikan kejuruan yang mempunyai fungsi utama menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu akan menjadi lebih vital lagi.

Menurut DEPDIKBUD (1994), berdasarkan kecenderungan-kecenderungan dalam pergeseran struktur ekonomi, ketenagakerjaan, serta pengetahuan dan keterampilan kerja, beberapa tantangan mendasar yang dihadapi sistem pendidikan adalah: (1) pentingnya orientasi nilai tambah; (2) perubahan struktur masyarakat; dan (3) pengaruh proses globalisasi.

Tantangan pertama adalah makin dirasakan perlunya orientasi nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Orientasi nilai tambah yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia hanya dapat dicapai dengan keunggulan kualitas sumber daya manusia dalam mengusasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna.

Tantangan kedua ialah terjadinya transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai salah satu indikator dari terjadinya proses tinggal landas dalam pembangunan nasional kita. Transformasi tersebut berlangsung sebagai akibat dari berkembangnya sektor-sektor industri yang ditandai dengan munculnya jenis-jenis jabatan baru yang semakin beraneka ragam dan yang memerlukan jenis-jenis keterampilan dan keahlian baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tantangan ketiga ialah proses globalisasi yang mengakibatkan meningkatnya persaingan. Globalisasi yang semakin masif dan ekstensif ini telah mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, dan sosial budaya antar bangsa semakin kabur. Globalisasi menimbulkan persaingan antar bangsa yang semakin tajam terutama dalam bidang ekonomi serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Era global, di satu sisi membawa persaingan yang makin ketat, di sisi lain membuka peluang kerja sama. Untuk menghadapi persaingan dan untuk memanfaatkan peluang kerja sama, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai IPTEK dan keterampilan. Untuk itu pendidikan kejuruan memainkan peranan dan fungsi yang sangat penting.

Menurut Slamet PH (1995), tantangan-tantangan pada era industri di masa datang meliputi faktor-faktor berikut: produktivitas SDM, kualitas, harga, layanan, kecepatan/ ketepatan waktu, kenyamanan, pilihan (kompleksitas produk), gaya hidup, nilai tambah, dan kemutahiran teknologi.

Khusus untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan, Wardiman Djojonegoro (1995) telah menawarkan orientasi baru dari sistem lama ke sistem masa depan yang diwujudkan dalam sejumlah dimensi kunci kebijakan (Tabel 1).

**2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Tantangan masa depan yang ditandai dengan perkembangan IPTEK menuntut kualitas SDM yang lebih tinggi. Menurut Muhammadi (1990), untuk menghadapi kecenderungan tersebut diperlukan tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 1. Dimensi Kebijakan Kunci Pendidikan dan Pelatihan

| MASA LALU | | MASA DEPAN |
|---|---|---|
| Sistem yang disetir persediaan yang didasarkan atas permintaan sosial yang besar | lawan | Sistem yang disetir oleh permintaan yang dipedomani oleh tanda-tanda pasar kerja |
| Sistem berdasarkan sekolah yang memberikan "Ijazah" setelah ujian | lawan | Sistem pendidikan dan pelatihan yang memberi "kompetensi", sesuai dengan standar yang diakui secara nasional |
| Sistem berdasarkan sekolah dengan keluwesan minimum dalam penyampaian | lawan | Sistem pendidikan dan pelatihan dengan akses untuk masuk/keluar secara luwes dan penyampaian yang luwes |
| Tak ada pengakuan secara resmi pembelajaran sebelumnya | lawan | Sistem yang secara eksplisist mengakui keterampilan dan "kompetensi", dimana saja dan bagaimanapun mereka dapatkan |
| Sistem berdasarkan sekolah dengan orientasi program studi | lawan | Sistem pendidikan dan pelatihan yang diarahkan terhadap keahlian dan kejuruan yang diakui secara resmi |
| Pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada sektor formal | lawan | Pendidikan dan pelatihan untuk sektor formal dan informal |
| Pemisahan antara pendidikan dan pelatihan | lawan | Integrasi pendidikan dan pelatihan secara penuh, dari perspektif ilmu pengetahuan kognitif |
| Sistem Manajemen terpusat | lawan | Sistem manajemen terdesentralisasi |
| Institusi yang sepenuhnya dibiayai dan dijalankan oleh pemerintah pusat | lawan | Institusi yang berdikari dan swakelola dengan dukungan sebagian dari pemerintah pusat |



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

**a. Tenaga kerja yang produktif:**

Untuk menunjang perkembangan industri yang makin kompetitif, diperlukan tenaga kerja yang produktif, yaitu tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi secara efisien dengan beaya rendah. Tenaga kerja yang produktif ini perlu mempunyai keterampilan yang tinggi dan sadar mutu.

**b. Tenaga kerja yang dinamis, kreatif dan inovati:**

Untuk dapat bersaing dalam lingkungan yang berubah dengan cepat dan beraneka ragam diperlukan kemampuan untuk menanggapi perubahan secara dinamis. Industri dituntut pula untuk selalu menghasilkan produk-produk baru. Daya kreatif dan inovatif ini akan menjadi bibit untuk menumbuhkan wira usaha baru.

**c. Tenaga kerja yang akrab IPTEK:**

Industri akan menjadi semakin padat IPTEK. Interaksi manusia dan IPTEK akan menjadi makin intensif. Untuk itu diperlukan tenaga kerja yang akrab IPTEK, yang mampu untuk memilih, untuk menangani, memelihara dan kalau perlu men-ciptakan IPTEK.

Menurut Selo Sumardjan (1990), ciri-ciri masyarakat modern, antara lain: melihat ke masa depan, percaya pada diri sendiri, sikap hidup kritis, gaya hidup kreatif, cara berpikir rasional dan analitik, kekuatan IPTEK berpengaruh kuat, bersifat dinamis, inovatif, keanekaragaman profesi, usaha hidup perencanaan jangka panjang, berorientasi budaya global.

Boediono (1991) mengatakan bahwa ditinjau dari hubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan di era indistrialisasi, proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah lebih besar daripada mereka yang tidak berpendidikan dan berpendidikan tinggi. Pola demikian terjadi karena dalam masa itu diperlukan lebih banyak tenaga kerja yang berpendidikan menengah sebagai pelaksana



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

langsung pembangunan. Oleh karena itu, dalam memasuki proses tinggal landas maka proporsi tenaga kerja yang berpendidikan menengah harus ditingkatkan seperti pola proporsi tenaga kerja negara yang telah melakukan tinggal landas. Pada akhir PJP 25 tahun ke dua, proporsi tenaga kerja yang tidak berpendidikan diduga perlu dikurangi dari 53% menjadi misalnya 11%. Mereka yang berpendidikan dasar menengah masing-masing ditingkatkan dari 34% dan 11% berturut-turut menjadi misalnya 52% dan 32%.

Berdasarkan visi SDM pada tamatan SMK di masa datang tersebut, maka apabila ditinjau secara komprehensif yang dikaitkan dengan pendidikan kejuruan secara umum, di masa datang diperlukan adanya SDM dengan indikator-indikator: (1) produktivitas tenaga kerja (SDM) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dan (2) fleksibilitas tenaga kerja (SDM) yaitu kemampuan tenaga kerja untuk berpindah lintas sektor ekonomi dan antar industri sekiranya struktur ekonomi berubah. Untuk mencapai kualifikasi tenaga kerja atau SDM seperti yang dimaksud, maka dalam kurikulum pendidikan kejuruan di masa datang sebaiknya menggunakan konsep *Broad Base Curriculum*.

Dikatakan selanjutnya oleh Slamet PH (1995) bahwa ciri utama kompetensi adalah "kemampuan mengerjakan sesuatu". Oleh karenanya, tingkat kemampuan mengerjakan sesuatu sering dipergunakan sebagai pengukur tingkat kualitas tamatan. Alat yang sering dipergunakan untuk mengukur kompetensi adalah tes kompetensi kejuruan (*occupational competency testing*). Dimensi relevansi tamatan ditunjukkan oleh indikator-indikator seperti penempatan kerja yang relevan dengan pendidikannya, masa tunggu kerja yang relatif pendek, dan penghasilan yang relatif lebih tinggi dibanding tamatan dari pendidikan lain yang sederajad. Dimensi akses tamatan ditunjukkan oleh terbukanya peluang bagi tamatan pendidikan kejuruan (misal SMK) untuk mengembangkan dirinya di masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun peluang untuk memasuki lapangan kerja. Oleh karena itu dalam visi pendidikan kejuruan di masa datang sangat diperlukan dukungan dari instrumental input (kurikulum, guru, kepala sekolah, fasilitas,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

biaya, manajemen, aspek-aspek legal) serta dukungan aspek eksternal seperti orang tua siswa, industri, Majelis Sekolah, dll.

### 3. Pengalaman Pendidikan Kejuruan di Negara lain

Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan di bidang ekonomi. Pendidikan kejuruan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk meniti karir bagi peserta didik dan untuk menjamin suatu tenaga kerja terampil bidang ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa terdapat suatu kaitan yang erat antara pelatihan dengan prospek karir. Tuntutan pasar kerja untuk tenaga kerja yang berkualifikasi telah meningkat: keterampilan dan pengetahuan membantu meningkatkan kualitas pekerjaan. Kebutuhan tenaga kerja semi terampil dan pekerja tidak terampil dewasa ini cenderung berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut di Jerman telah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan kejuruan yang terintegrasi dengan dunia industri dengan melalui pola dual system. Di samping itu, Jepang juga menerapkan pola dual system yang sangat bersandar pada pelatihan di tempat kerja untuk mengembangkan kualitas lulusan, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan.

Menurut Boediono (1991), dengan pola persekolahan tersebut ternyata lebih mudah menghasilkan tenaga kerja dengan fleksibilitas dan keterampilan yang mampu menjawab perubahan teknologi dan pasar yang sangat cepat dan tidak dapat diduga. Ada empat komponen utama dalam pelatihan yang diberikan oleh perusahaan Jepang. Yang paling pokok adalah keterampilan umum diperoleh terutama melalui rotasi pada berbagai departemen. Tenaga kerja berpindah-pindah mengerjakan berbagai tugas di dalam dan diantara bengkel kerja. Komponen kedua dalam pelatihan adalah keluar kerja, yaitu ke pusat-pusat khusus yang diorganisir oleh perusahaan. Ketiga, perusahaan Jepang menganjurkan peningkatan keterampilan melalui kursus tertulis yang biayanya seringkali akan diganti oleh pengusaha. Keempat, partisipasi dalam kegiatan lingkaran mutu yang berakibat pada peningkatan kemampuan pada umumnya. Secara singkat, tenaga kerja dalam negara Jerman dan Jepang tersebut mem-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

peroleh keterampiulan umum dan khusus melalui kombinasi penugasan yang sangat bersifat struktural di tempat kerja, pelatihan, dan pendidikan.

## E. Visi Kegiatan Unit Produksi di SMK yang Akan Datang

### 1. Konsep Unit Produksi

Unit produksi merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Direktorat pendidikan Menengah Kejuruan yang dimaksudkan sebagai salah satu pola pengajaran di sekolah disamping pola-pola lain yang lazim diterapkan. Hal ini antara lain dimaksudkan dalam rangka mendekatkan kesesuaian antara mutu tamatan dengan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Unit produksi sebagai wahana pelatihan keahlian kejuruan harus dikelola secara profesional, baik yang menyangkut input pendukung, pengoperasian maupun manajemennya.

Pengelolaan unit produksi secara profesional antara lain dapat dilihat dari indikator-indikator seperti yang tertuang dalam pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa kegiatan unit produksi di SMK meliputi: (1) mengorientasikan kegiatan belajar siswa pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual; (2) mengorientasikan kegiatan peningkatan kemampuan guru SMK pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual; (3) mengusahakan kegiatan praktek siswa di dunia kerja; (4) mengusahakan kegiatan magang bagi guru di dunia kerja; (5) melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola; (6) menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan jasa bagi SMK; (7) melaksanakan kegiatan kerjasama produksi, pemasaran, dan promosi; dan (8) melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dengan mendayagunakan sumber daya di sekolah yang sekaligus dapat memberi pemasukan dana bagi sekolah.


Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Jadi, tujuan penyelenggaraan unit produksi di SMK antara lain: memberikan kesempatan kepada peserta didik dan guru mengerjakan praktek yang berorientasi kepada pasar, mendorong siswa dan guru mengembangkan wawasan ekonomi dan berwiraswasta, memperoleh tambahan dana bagi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan sumber daya sekolah serta meningkatkan kreativitas siswa dan guru.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyelengaraan unit produksi di SMK akan sangat ditentukan oleh pendayagunaan secara optimal dari seluruh bentuk modal di sekolah dan manajemen yang ditunjang oleh suatu mata rantai atau jaringan usaha yang saling membutuhkan ataupun saling menguntungkan. Bilamana cara ini dapat ditempuh, maka suatu model atau bentuk penyelenggaraan unit produksi yang profesional dapat diwujudkan, dengan tidak melepaskan diri dari program atau kurikulum yang ada.

Unit produksi merupakan suatu usaha yang menghasilkan sesuatu barang ataupun jasa, maka mutlak memerlukan "seperangkat alat usaha" sebagai modal utamanya. Bentuk usaha (yang dalam hal ini berupa unit produksi) adalah suatu sistem yang terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sistem tersebut pada dasarnya terdiri dari input, proses dan output yang merupakan suatu mata rantai tertutup dan menuntut pengelolaan secara profesional.

Pengertian masukan instrumental dalam suatu kegiatan atau usaha unit produksi di SMK dapat berupa: sumber daya manusia, prasarana, sarana, bahan dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan masukan usaha. Sedangkan proses dalam jalin-an usaha ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat berupa pengerjaan segala sesuatu sesuai dengan jenis atau bentuk produksinya. Sementara itu, output dalam kegiatan unit produksi dapat berupa barang atau jasa, baik secara kuantitas maupun kualitas akan sangat tergantung dari input dan proses produksinya. Disamping itu, usaha dalam bentuk unit produksi perlu didukung oleh adanya sistem manajemen seperti: pemasaran, promosi, *research and development, quality control*, dan lain-lain.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## 2. Unit Produksi sebagai Replika Perusahaan

Berdasarkan konsep LINK & MATCH yang telah diuraikan di atas disebutkan bahwa salah satu realisasinya adalah dengan kebijakan penyelenggaraan Unit Produksi di sekolah.

Unit Produksi dapat dikatakan sebagai miniatur suatu perusahaan yang banyak berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, yaitu: status usaha, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan manajemen dalam usaha. Selanjutnya bidang usaha dapat diklasifikasikan ke dalam produksi dan jasa. Bidang jasa adalah suatu usaha yang secara langsung dapt dinikmati oleh konsumen, sedangkan usaha dalam bidang produksi pada umumnya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh konsumen.

Meskipun UP meerupaka jenis usaha yang berada dalam lingkup pendidikan namun untuk mengarah pada suatu usaha yang profesional perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Status usaha

   Adalah bentuk atau badan apa yang dikehendaki oleh lembaga pendidikan sebagai penyelenggara unit produksi. Bentuk-bentuk status usaha tersebut dapat berupa: perorangan, persekutuan, persero, dan koperasi.

2. Tujuan Usaha

   Sebagai suatu lembaga usaha yang mempunyai status tertentu, maka perlu dirinci secara konkret tujuan yang akan dicapai atau dijalankan baik dalam jangka pendek ataupun jangka penjang atau tujuan yang didasarkan atas "bisnis oriented"

3. Sasaran

   Sasaran yang dimaksud dalam unit produksi disini mengarah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan kepada siapa unit produksi ini ditujukan.

4. Ruang lingkup usaha

   Berdasarkan tujuan dan sasarannya maka perlu dijelaskan mengenai ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Untuk usaha pada bidang jasa tentunya

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

akan berbeda dengan yang bersifat produksi. Cakupan usaha ini dapat didasarkan pada skala usahanya, yaitu: kecil, menengah dan besar atau berbentuk aneka usaha.

5. Manajemen Usaha

Untuk menjalankan usaha yang profesional maka dituntut cara pengelolaan yang profesional juga. Meskipun UP merupakan usaha yang berada di dalam lingkungan pendidikan, namun tetap dapat dikelola dengan cara-cara yang profesional tersebut. Namun demikian, salah satu kendala yang ada pada umumnya berkaitan dengan masalah ketiadaan sumber daya manusia yang ada.

Pengelolaan atau manajemen dalam usaha UP ini antara lain meliputi: (a) Struktur Organisasi; (b) Perencanaan; (c) Permodalan; (d) Tenaga kerja; (e) Analisis usaha; (f) Keuangan; (g) Produksi; dan (h) Pemasaran.

### 3. Manfaat Penyelenggaraan Kegiatan Unit Produksi

Unit produksi yang merupakan salah satu model pendekatan pengajaran di SMK diharapkan dapat memberikan dampak atau keuntungan bagi lembaga penyelenggara ataupun pihak lain yang terlibat di dalamnya. Menurut Hidayat (1991), unit produksi melalui hubungan dengan industri secara terus-menerus otomatis akan menjadi sarana pelatihan nyata (*on the job training*) bagi seluruh staf pengajar/instruktor dan peserta didik dalam bidang kewirausahaan, sehingga iklim industri dapat diserap secara nyata, dan hal ini akan dapat meningkatkan profesionalisme masing-masing. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap keuntungan unit produksi dapat digunakan untuk menunjang biaya operasional pendidikan dan pengembangan institusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggara kegiatan unit produksi akan memberikan keuntungan pada pelatihan kewirausahaan serta dapat meningkatkan tambahan pendapatan bagi penunjang biaya operasional pendidikan.

Disisi lain, penyelenggaraan unit produksi dapat memberikan motivasi kepada para penyelenggara pendidikan untuk dapat bekerja dengan sebaik-



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

baiknya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Barows (1983), bahwa hasil produksi yang berujud barang dan jasa akan memberikan motivasi dan rasa bangga dalam bekerja. Sedangkan beberapa keuntungan lain menurut Benny Suprapto (1989) adalah: (1) guru dan peserta didik dapat kesempatan latihan kerja produktif secara memadai dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; (2) guru dan peserta didik yang terlibat dalam unit produksi akan memperoleh tambahan penghasilan sehingga dapat meningkat kesejahteraannya; dan (3) lembaga pendidikan akan mendapatkan tambahan biaya operasional pendidikan. Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan unit produksi juga akan memberikan keuntungan sebagai berikut: (1) menciptakan lapangan pekerjaan di lembaga yang bersangkutan; (2) mendorong sekolah/ lembaga pendidikan untuk mandiri dalam mengatasi masalah penurunan satuan biaya pendidikan kejuruan; dan (3) meningkatkan mutu dan perilaku integritas (Dikdasmen, 1987).

**4. Struktur Organisasi UP**

Organisasi bukan merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Organisasi merupakan suatu susunan yang logis dengan struktur yang dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kedudukan dan posisi setiap personel/pejabat. Untuk menentukan struktur organisasi UP hendaknya disesuaikan dengan ruang lingkup SMK dan potensi bidang usaha yang dimilikinya. Hal ini mengingat kondisi SMK di Indonesia cukup beragam. Ada beberapa SMK yang mempunyai lima atau lebih program studi/jurusan, namun tidak sedikit SMK yang hanya mempunyai kurang dari tiga jurusan. Hal yang harus dipertimbangkan adalah faktor kepraktisannya, yakni kurangi sekecil mungkin birokrasi atau mekanisme kerja yang bertele-tele. Hal ini sesuai pendapat Drucker (Engkoswara,1987), yang mengatakan bawha jenjang manajemen yang ada pada organisasi hendaknya sedikit mungkin, dan dengan alur perintah *(chain of command)* yang sependek

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mungkin. Di samping itu, menurut Karol dan Ginsburg (1980), pembentukan organisasi harus memperhatikan adanya sistem koordinasi, efisiensi, tanggung jawab dan kese-imbangan.

**5. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling penting dalam organisasi, karena merupakan motor penggerak utama terhadap semua aktivitas organisasi (Karol and Ginsburg, 1980). Suatu langkah yang esensial dalam perencanaan UP adalah mengiventarisasi semua SDM yang ada di sekolah, meliputi guru, siswa dan warga sekolah lainnya yang mempunyai potensi dan minat atau kesungguhan untuk terlibat dalam UP. Iventarisasi SDM meliputi jenis & tingkat kemampuan/keahlian, minat dan waktu yang tersedia untuk UP. Kemampuan SDM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis (manajerial). Kemampuan teknis disesuaikan dengan jurusan/bidang studi yang ada di sekolah, misalnya program studi sekretaris, akuntasi dan perbankan, usaha perjalanan wisata, dan sebagainya. Selanjutnya keahlian tersebut harus lebih diperinci lagi sesuai dengan spesialisasinya. Kemampuan non-teknis berkaitan dengan pengelolaan UP, seperti administrasi, pemasaran, kerja sama dan sebagainya. Untuk jenis kemampuan ini, terutama warga sekolah yang tidak atau kurang mempunyai kemampuan teknis seperti tenaga administrasi dan para siswa yang berminat bisa dilibatkan dalam tugas-tugas non-teknis.

Inventarisasi keahlian hendaknya juga dilengkapi dengan kualitas atau tingkat keahliannya. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman profesi/keahlian yang dipunyai oleh setiap SDM. Apabila perlu untuk mengiventarisasi kualitas keahlian dapat dilakukan informasi silang (cross check) dari rekan guru, siswa atau sumber-sumber lainnya.

Minat atau kesungguhan untuk terlibat dalam UP merupakan faktor yang penting. Meskipun seseorang mempunyai keahlian yang mumpuni dan berpengalaman di bidangnya, tetapi tanpa minat yang memadai mustahil bisa men-



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

goptimalkan segala kemampuannya untuk berkiprah di UP. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam UP mempunyai minat dan dedikasi tinggi untuk mensukseskan UP.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tetang UP, lebih dahulu perlu dijelaskan secara menyeluruh tentang tujuan, manfaat dan aturan-aturan penyeleng-garaan UP kepada warga sekolah. Dengan memahami tujuan dan manfaat UP diharapkan warga sekolah yang berminat benar-benar berkeinginan untuk berperan aktif guna mencapai tujuan UP secara keseluruhan, dan bukan untuk keuntungan pribadi semata. Hal ini perlu ditekankan mengingat UP tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi yang lebih penting adalah bisa meningkatkan kreatifitas, keterampilan dan sikap profesional serta kedisiplinan yang mengarah pada peningkatan mutu lulusan SMK.

**6. Fasilitas/Peralatan**

Sadono Sukirno (Iwa, 1994) menyebutkan bahwa segala barang yang diciptakan manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang lain atau jasa-jasa yang akan digunakan masyarakat (fasilitas/peralatan) adalah merupakan modal dalam produksi. Fasilitas atau peralatan merupakan salah satu modal yang menunjang terhadap suatu proses produksi, dan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi.

Salah satu tujuan UP adalah meningkatkan daya guna sumber daya pendidikan, termasuk fasilitas/peralatan yang ada di sekolah. Untuk menyelenggarakan UP, semua fasilitas yang ada di sekolah harus diiventarisasi. Iventarisasi meliputi jenis, kuantitas dan kualitas dari fasilitas yang ada, antara lain; ruang kelas, laboratorium, peralatan dan berbagai fasilitas lain yang bisa digunakan untuk UP.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## F. Kerangka Berpikir

Unit Produksi (UP) merupakan sebagian bentuk upaya pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Belajar dengan melakukan (pekerjaan) pada kondisi yang nyata, melalui UP, adalah cara belajar yang sarat nilai, karena banyak pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat diperolehnya. Untuk itu keberhasilan pelaksanaan UP sangat besar kontribusinya bagi pengembangan mutu pendidikan menengah kejuruan.

Pelaksanaan UP di SMK saat ini dipandang belum berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai penyebab belum berhasilnya pelaksanaan UP ditengarai antara lain karena: belum memadainya potensi sekolah dan atau kurang optimalnya pemanfaatan potensi sekolah (SDM, sarana/prasarana, dana), kurangnya kesiapan sekolah dan kesiapan dunia usaha, kekurang tepatan perencanaan, banyaknya kendala dalam pelaksanaan program, dan belum optimalnya daya dukung lingkungan. Sesungguhnya, faktor-faktor penyebab belum optimalnya penyelenggaraan UP di SMK bukan merupakan faktor-faktor yang sudah *given*. Faktor-faktor tersebut dapat diubah dan dikembangkan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan UP secara lebih optimal.

Untuk meningkatkan mutu UP di SMK diperlukan kajian yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh mempunyai pengertian bahwa kajian UP tidak hanya meliputi SMK saja, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini antara lain meliputi kondisi dan potensi wilayah (terutama sosial, ekonomi dan budaya) di mana SMK tersebut berada, kondisi dunia usaha/industri berdasarkan sektor, jenis dan kualifikasinya (sektor = formal, non-formal; jenis = industri pariwisata, perjalanan, otomotif, pangan, garment, dan sebagainya; kualifikasi = kecil, menengah, dan besar/aneka industri), peran orang tua dan masyarakat, asosiasi-asosiasi profesi, dan sebagainya. Sedangkan pengertian kata terpadu mempunyai makna bahwa komponen-komponen yang terkait dengan UP sesungguhnya merupakan komponen-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

komponen yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Tidak bekerjanya salah satu komponen atau lebih, akan berpengaruh buruk terhadap mekanisme kerja sistem tersebut.

Fokus pengkajian atau penelitian tentang UP di SMK (khususnya STM) paling tidak harus mencakup tiga hal berikut: (1) kondisi atau potret UP di STM yang ada saat ini, dan (2) Visi (model-model) UP yang ideal di masa datang.

Gambaran yang akurat tentang kondisi pelaksanaan UP di STM saat ini sangat penting. Dalam hal ini dapat diketahui kondisi berbagai komponen yang tercakup dalam penyelenggaraan UP di STM, antara lain: intake (masukan/peserta didik); instrumental input atau kondisi dan potensi sekolah (SDM, perangkat keras dan perangkat lunak seperti fasilitas dan sarana/prasarana, modal/dana, program studi/ kurikulum, pendanaan, peraturan perundangan, dan lain-lain); potensi dunia usaha/industri; perencanaan dan pelaksanaan program UP; dan pencapaian tujuan atau evaluasi dan dampaknya (sesuai dengan tujuan dan manfaat menyelenggarakan UP).

Visi UP menyangkut tentang sistem penyelenggaraan UP yang ideal, sesuai dengan tantangan dan kondisi dunia pendidikan dan dunia usaha/industri serta kondisi lingkungan lainnya. Di dalam visi ini dikaji tentang pola-pola dan mekanisme penyelenggaraan UP yang sesuai dengan kondisi STM. Mengingat adanya keragaman kondisi STM dan daya dukung lingkungan di sekitarnya, maka dimungkinkan adanya beberapa alternatif model/bentuk dan mekanisme penyelenggaraan UP.

Setelah mengetahui data yang akurat tentang kondisi setiap komponen penyelenggaraan UP di STM, maka perlu dianalisis, terutama dibandingkan dengan kondisi UP ideal sesuai yang ada pada visi. Melalui analisis tersebut akan diketahui komponen-komponen apa saja yang belum baik dan yang sudah baik (sesuai yang diharapkan).

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## G. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada kajian teoritis dan kerangka berfikir di atas, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Potret Pelaksanaan Unit Produksi di STM saat ini:
   a. Seberapa besar tingkat pemahaman warga sekolah di STM terhadap UP?
   b. Seberapa jauh usaha pemasyarakatn UP di STM?
   c. Bagaimanakah UP direncanakan?
   d. Bagaimanakah model-model UP yang dilakasanakan?
   e. Apa sajakah hamabatan yang dialami dalam pelaksanaan UP?
   f. Apakah memiliki dasar dan berbadan hukum dalam melaksanakan UP?
   g. Sejauhmana fasilitas dimiliki sekolah untuk melaksankan UP?
   h. Bagaimanakah pengelolaan UP dilakukan?
   i. Bagaimanakah kerjasama sekolah (UP) dengan pihak lain?
   j. Bagaimanakah pengelolaan sumber daya manusia dalam kegiatan UP?
   k. Sejauhmana modal diupayakan untuk operasionalisasi UP?

2. Visi Penyelenggaraan UP di STM Masa Mendatang:
   a. Apakah dasar hukum yang dipergunakan?
   b. Apa saja jenis usaha yang dapat dijalankan?
   c. Apakah tujuan dan manfaat UP?
   d. Seperti apa model penyelenggaraan UP?
   e. Bagaimanakah struktur organisasi dan job diskripsi pengelolaan UP?
   f. Seperti apakah SDM yang menangani?
   g. Seperti apakah sarana dan pra sarana yang dibutuhkan?
   h. Bagaimanakah bentuk pemasaran dilakukan?
   i. Bagaimanakah keterkaitan UP dengan program PSG?

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan, yang direncanakan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan, yaitu menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan tentang pengembangan UP STM di Indonesia.

Metode pendekatan penelitian kebijakan ini adalah metode deskriptif dengan cara survey. Survey dilakukan dengan mengkaji kondisi pelaksanaan UP STM saat ini *(Condition of being)*. Di samping itu, melalui wawancara dengan para pakar (akademisi dan praktisi), dan kajian aspek legal serta kajian pustaka yang relevan. Berdasarkan hasil kajian kondisi pelaksanaan UP saat ini akan diperoleh suatu alternatif kebijakan tentang pengembangan pelaksanaan UP di STM masa datang.

Pelaksanaan dan visi UP, secara sistemik mencakup beberapa komponen sebagai berikut: pemahaman tentang UP, pemasyarakatan, perencanaan kegiatan UP, pola pelaksanaan UP, hambatan pelaksanaan UP, dasar hukum, bentuk usaha, jenis usaha, fasilitas, manajemen, kerja sama, pemasaran, penentuan sasaran, sumber daya manusia, modal, dan pemanfaatan hasil UP.

## B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada SMK jenis atau bidang teknologi dan industri, yaitu STM negeri tiga tahun yang meliputi STM N Sleman, Wonosari, Bantul, Kulon Progo, dan BLPT Yogyakarta. Sedangkan STM Pembangunanan tidak termasuk dalam penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan STM tiga tahun. Dalam penelitian ini sebagai subjek penelitian atau unit analisisnya adalah sekolah, dengan sumber data dari Kepala Sekolah, Petugas pelaksana UP, guru, siswa, tenaga administrasi maupun tenaga kependidikan lainnya, industri/ perusahaan yang menjadi



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pasangan SMK dalam melaksanakan UP, Kanwil dan Kandep Depdikbud setempat, Asosiasi Pekerja, Asosiasi Profesi, Pakar, Politeknik/Akademi yang telah melaksanakan UP serta instansi-instansi lain yang terkait.

Sampel penelitian sekaligus dari populasinya, yaitu sebanyak lima STM tersebut.

## C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi. Metode dokumentasi dan kuesioner digunakan untuk mengungkap semua data yang telah terjadi, sedangkan metode wawancara digunakan sebagai tambahan untuk melengkapi data dari dokumentasi dan kuesioner yang ada atau untuk keperluan pemeriksaan keabsahan atau validasi data. Metode observasi dilakukan untuk mengungkap data terutama yang menyangkut proses yang terjadi baik di STM, serta data-data lain yang tidak dapat digali melalui dokumentasi, kuesioner dan wawancara.

## D. Batasan Variabel Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan kondisi pelaksanaan dan visi Unit Produksi (UP) di STM, maka variabel yang akan diteliti meliputi:

1. Potensi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan Unit Produksi (UP), meliputi: (1) sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah; (2) fasilitas dan peralatan (hard-ware); dan (3) program dan kemampuan managemen (soft-ware).
2. Potensi pasar, mencakup indikator-indikator: keadaan konsumen; dan jenis serta variasi usaha baik dalam bentuk produk maupun jasa.
3. Perencanaan program, meliputi: (1) tujuan; (2) mekanisme kerja; (3) manajemen/organisasi; (4) modal; dan (5) bidang usaha.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Pelaksanaan, mencakup indikator-indikator: personil, sistem penggajian, strategi/cara, biaya produksi, kerjasama, identifikasi mengenai faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung.
5. Variabel hasil, meliputi indikator-indikator: jenis atau variasi, kualitas/kuantitas produk, pemasaran, dan harga.
6. Variabel dampak atau manfaat, mencakup aspek pedagogik, ekonomi maupun aspek sosial.

## E. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan dan jenis variabel yang akan diteliti, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: angket, pedoman wawancara (*interview guide*), dan pedoman observasi. Semua instrumen merupakan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang akan diteliti.

Pengujian validitas instrumen yang dilakukan terutama berkaitan dengan validitas isi, baik dengan melalui pertimbangan ahli (*expert judgment*) maupun seminar-seminar.

Instrumen ini tidak dilakukan uji coba secara khusus, oleh karena instrumen yang dipakai merupakan adopsi dari instrumen yang pernah dipergunakan dalam penelitian tingkat nasional yang dilakukan oleh Slamet PH, dkk (1995).

## F. Penetapan Visi UP di SMK Mendatang

Penetapan visi UP didasarkan pada kajian pustaka yang meliputi: philosofi pendidikan kejuruan, tantangan masa depan, Sumber Daya Manusia di masa depan, pengalaman negara lain, peraturan perundangan (aspek legal), dan hasil-hasil penelitian ini.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## G. Teknik Analisis Data dan Langkah-Langkahnya

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data kasar
2. Pengkode-an data atau Coding, terutama untuk keperluan analisis yang bersifat kuantitatif
3. Pemilahan data
4. Perekaman data
5. Analisis deskriptif kuantitatif
6. Analisis deskriptif kualitatif
7. Interpretasi hasil/Pembahsan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil-hasil dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi duan bagian, yaitu hasil penelitian tentang potret pelaksanaan UP di STM, dan hasil penelitian tentang visi UP di STM untuk masa datang. Dari kedua bagian tersebut dalam laporan ini disajikan menjadi dua kelompok pula, seperti yang diuraikan di bawah ini.

## A. POTRET PELAKSANAAN UNIT PRODUKSI DI STM

Temuan penelitian tentang pelaksanaan/potret Unit Produksi (UP) di SMK Bidang Teknologi dan Industri, yaitu STM, secara umum adalah belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi yang demikian tersebut secara khusus dapat dilihat pada tiap komponen yang ada dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan UP di sekolah. Beberapa komponen tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pemahaman warga sekolah tentang Unit Produksi

Pemahaman warga (baik guru maupun karyawan) STM terhadap keberadaan UP di sekolah sebagian besar telah memahami tentang berbagai kebijakan yang terkait dengan UP, seperti adanya tujuan dan manfaat, peraturan-peraturan, adanya kegiatan atau program, dan hal-hal lain dalam mengembangkan UP di sekolah. Hanya sebagian kecil yang belum memahami tentang keberadaan UP di sekolah (khususnya warga sekolah yang tidak terlibat langsung terhadap kegiatan UP), baik secara konsep, tujuan diadakannya UP, serta manfaat dengan mengadakan UP di sekolah.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## 2. Pemasyarakatan kebijakan UP

Pemasyarakatan yang dilakukan oleh sekolah terhadap keberadaan UP-nya masih sangat terbatas dan pada umumnya hanya pada lingkungan di dalam sekolah. Sedangkan pemasyarakatan di luar sekolah masih jarang dilakukan atau belum sampai pada tingkatan yang meluas di masyarakat umum. Hal ini terjadi (meskipun sebagian besar telah memahami tentang UP) karena warga sekolah belum berbuat banyak terhadap program-program pemasyarakatan secara profesional.

Dalam hal ini usaha sekolah yang dilakukan adalah masih terbatas pada usaha memasyarakatkan secara apa adanya, belum sampai pada usaha-usaha secara profesional dalam berbisnis, seperti melakukan periklanan, kerjasama dengan lembaga lain (seperti media cetak dan elektronik), dan sebagainya. Hampir semuanya bersifat insidental saja.

Terdapat beberapa kendala dalam memasyarakatkan UP di sekolah, yaitu: (a) keterbatasan waktu bagi warga sekolah; (b) keterbatasan dana yang dikhususkan untuk memasyarakatkan UP sekolah; (c) tidak adanya program khusus pemasyarakatan; (d) kurangnya daya dukung fasilitas kebijakan pemerintah tentang UP di sekolah; (e) kurangnya pemahaman warga terhadap UP, dan (f) belum memadai kemampuan warga (terutama guru) terhadap kegiatan UP.

## 3. Perencanaan kegiatan UP

Hanya sebagian kecil sekolah yang membuat perencanaan kegiatan UP secara terprogram dengan baik dan hanya pada jurusan tertentu saja (seperti jurusan Mesin dan Bangunan, karena kedua jurusan ini dapat memproduksi barang sebagai produksi standar yang langsung dapat dipasarkan). Sebagian besar sekolah dan kebanyakan jurusan (seperti Jurusan otomotif, Elektronika, dan Elektro) dengan program kerja yang cenderung apa adanya dan belum ada perencanaan program yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

panjang. Hal ini disebabkan ketiga jurusan tersebut kegiatan UP-nya lebih banyak bersifat jasa. Dengan kata lain, bahwa kegiatan yang ada sebagian besar didasarkan atas program "dadakan" (Jawa). Hal ini terjadi karena kebanyakan kegiatan yang terjadi didasarkan atas order yang masuk. Belum merupakan kegiatan yang direncanakan sebelumnya dengan melakukan kerjasama kepada pihak-pihak lain khususnya konsumen.

Bilamana ditinjau secara khusus per bagian kegiatan, beberapa program kegiatan yang belum direncanakan dengan baik antara lain menyangkut: jenis usaha, pengelolaan, promosi dan pemasaran, tenaga kerja, permodalan, perencanaan administrasi atau perencanaan komponen lainnya.

**4. Model penyelenggaraan UP dan Jenis Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum dan ditinjau dari yuridis formal, maka model penyelenggaraan UP di STM sebagian besar dengan model badan usaha milik sekolah yang "berdiri sendiri", akan tetapi masih di bawah naungan sistem sekolah. Akibat dengan model ini antara lain UP belum berjalan secara profesional karena baik SDM, fasilitas, produksi, dan lain-lain masih ditangani oleh sekolah (dalam pengertian hanya warga sekolah, tanpa melibatkan para ahli produksi).

Kemudian apabila didasarkan jenis usahanya, ditemukan bahwa di STM terdapat jenis usaha produksi dan jasa. Berdasarkan kedua jenis usaha ini, maka model-model UP yang ada antara lain:

a. Jenis usaha produksi, UP yang banyak diterapkan adalah dengan **model pesanan**, dimana kegiatan usaha produksi dilakukan apabila terdapat konsumen melakukan pesanan barang-barang dengan ketentuan harga, bahan, dan lain-lain didasarkan atas kesepakatan bersama. Dalam model ini terdapat pula sebagian sekolah yang menerapkan **model sub-kontrak** dengan pihak konsumen (PT, CV, perorangan) dalam rangka memenuhi sebagian saja dari kebutuhan yang ada. Kegiatan produksi yang bersifat

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

reguler (PBM praktek siswa) ada kecenderungan bisa disesuaikan dengan pesanan. Sedangkan untuk kegiatan reguler yang di luar pesanan (sesuai kurikulum), maka hasil produksi dipasarkan melalui kerjasama pihak luar sekolah. Model terakhir dengan menerapkan **pola dagang** usaha sebagaimana pada umumnya.

b. Jenis usaha jasa, maka kegiatan yang banyak dilakukan dalam UP sekolah adalah dengan **model latihan/magang** dan **model maintenance (layanan perawatan)**. Model latihan/magang diterapkan pada kegiatan UP bilamana terdapat konsumen yang menghendaki adanya peningkatan SDM untuk kepentingan lembaga/perusahaannya. Sedangkan model maintenance/layanan perawatan dilakukan bilamana terdapat pesanan/order dari konsumen untuk memperbaiki, merawat, sampai dengan merenovasi sesuatu barang, mesin, dan lain-lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pelaksanaan UP di STM ini belum mengarah pada model perusahaan mandiri yang profesional, dimana berkedudukan sejajar dengan sistem sekolah. Akan tetapi masih integrasi dengan sistem sekolah. Termasuk jenis-jenis usahanya belum dapat diklasifikasikan secara kongkret ke arah jenis usaha produk reguler, produksi standar, atau pesanan murni, baik untuk yang bersifat jasa maupun manufacturing.

**5. Hambatan pelaksanaan UP**

Dalam pelaksanaan kegiatan UP di STM sebagian besar mengalami beberapa hambatan, diantaranya yang dominan adalah:

a. *"culture"* warga sekolah yang belum mendukung sepenuhnya untuk menciptakan suatu usaha, terlebih usaha yang mengarah profesional:

1) sebagian besar warga sekolah belum memiliki jiwa berwiraswasta, antara lain disebabkan pola pikir dan tindakannya masih mempertahankan "profesi keguruannya".

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) adanya tugas dan beban mengajar guru yang belum memungkinkan bisa berkembangnya UP sekolah;

3) baik karyawan maupun para guru sebagian besar belum memiliki kemam puan "berusaha" vang mengarah *"profit oriented"*.

b. fasilitas (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) secara khusus untuk kegiatan UP belum/kurang mendukung, yang ada masih terbatas untuk kegiatan pokok PBM.

Melihat adanya berbagai hambatan yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan UP di STM masih mengandalkan sumber daya murni yang dimiliki sekolah, belum memiliki kemampuan/akses untuk mengelola dan bahkan memiliki sumber daya yang memadai. Idealnya, Up sebagai suatu sistem usana/perusahaan di sekolah harusnya memiliki sumber daya tersendiri, terpisah dengan sumber daya untuk kepentingan PBM.

**6. Dasar hukum**

Kondisi sekarang sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan dan mengembangkan UP di sekolah belum didukung oleh fasilitas pemerintah yang memadai, seperti kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang usaha-usaha yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Sementara itu yang ada adalah kebijakan-kebijakan yang mengatur khusus untuk usaha di luar lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Tingkat Menteri atau antar Menteri terkait.

Dengan melihat kenyataan tersebut alangkah baiknya apabila UP di STM sebagai suatu kegiatan usaha murni diberikan kekuatan dasar hukum yang pasti sesuai dengan asset dan jenis usaha yang dijalankan. Hal ini akan sangat baik sekali selanjutnya apabila juga didukung oleh semacam peraturan pemerintah yang menguatkan bahwa UP dapat dikelola di STM secara profesional.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## 7. Badan Hukum

Kondisi yang ada sekarang ini adalah usaha sekolah (UP) yang hampir semuanya belum memiliki badan hukum secara pasti. Hal ini terjadi karena kegiatan usaha di sekolah masih terintegrasi dengan manajemen di sekolah, belum merupakan usaha yang "terpisah" secara mandiri. Adanya sistem sekolah yang masih mengatur kegiatan UP menyebabkan sulit berkembangnya usaha di sekolah. Unit Produksi di sekolah berjalan seperti "apa adanya", tanpa adanya kekuatan hukum yang pasti.

Dengan demikian apabila UP akan berkembang di STM hendaknya diberikan kekuatan hukum atau berbadan hukum, baik CV, PT atau lainnya sesuai dengan asset dan jenis usaha yang dijalankan. Kegiatan UP yang cenderung tidak memiliki badan hukum akan banyak mengalami hamabatan dalam berkembang secara profesional.

## 8. Fasilitas

Fasilitas (perangkat lunak) yang dipergunakan untuk menyelenggarakan UP masih kurang, misalnya Buku Pedoman UP baik tingkat nasional maupun sampai dengan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan perangkat keras yang ada di sebagian besar sekolah sudah cukup memadai untuk melakukan usaha dalam taraf yang didasarkan atas **"pemanfaatan fasilitas saja"** atau disesuaikan dengan program studi yang ada. Sedangkan sebagian lainnya kurang memadai, sehingga perkembangan UP sekolah juga lamban.

Bilamana dikaitkan dengan UP sebagai suatu usaha yang mandiri (tanpa mengganggu kegiatan PBM), maka berdasarkan observasi bahwa belum ada fasilitas yang secara khusus hanya dipergunakan untuk kegiatan UP, seperti untuk produksi standar, pesanan/oreder atau lainnya.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## 9. Manajemen (Pengelolaan) UP

Manajemen usaha yang ada di sekolah selama ini masih menggunakan manajemen sekolah (manajemen "tradisional"), belum menggunakan manajemen usaha yang profesional. Manajemen usaha yang dilakukan di hampir semua sekolah masih terintegrasi dengan sistem sekolah, belum terpisah secara memadai. Baik mulai dari perencanaan usaha, operasionalisasi usaha, ketenagaan, keuangan, pengendalian, dan sebagainmya.

## 10. Kerjasama

Sangat sedikit dunia usaha/industri yang melakukan kerjasama dengan UP sekolah dalam bentuk akta perjanjian sebagai mitra usaha. beberapa melakukan kerjasama dengan Jurusan Mesin dan Bangunan, karena dari kedua jurusan tersebut dapat memenuhi sebagian kebutuhan perusahaan.

Sedikitnya kerjasama ini antara lain disebabkan dimungkinkan kurang percayanya dunia usaha terhadap keberadaan UP.

Belum terwujudnya kerjasama dengan dunia usaha yang lain, juga disebabkan karena produksi/jasa yang ada di UP belum mengarah pada hasil yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Bahkan cnderung mutunya di bawah standar luar.

## 11. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengelola UP di sekolah sekarang ini adalah semua warga sekolah yang nota bene belum "profesional" untuk mengelola usaha. Hal ini antara lain disebabkan: beban tugas banyak, jiwa usaha kurang, wawasan bisnis minim, latar belakang pendidikan pendidik.

Hanya terdapat sebagian kecil sekali (kurang dari 10%) guru STM yang memiliki jiwa usaha, sedangkan sebagian besar lainnya berprofesi guru

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

"minded". Sementara itu usaha sekolah untuk meningkatkan kemampuan pengelola UP juga belum dilakukan.

### 12. Modal

Hampir semua sekolah menggunakan modal usaha berasal dari sekolah sendiri, dimana UP sekolah sebagai "perusahaan" belum memiliki asset dan omset yang memadai secara sendiri (termasuk modal uang). Sepenuhnya masih milik sekolah dengan "manajemen sekolah" pula.

### 13. Pemanfaatan hasil UP

Dalam pengelolaan hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan UP di sekolah terdapat sebagian sekolah yang mengacu pada SK Dirjen Dikdasmen Nomor 294/C/Kep/R/1986. Sedangkan sebagian sekolah lain menggunakan pengaturan berdasarkan pada keputusan bersama, disesuaikan dengan kepentingan sekolah/perusahaan di sekolah.

Baik yang didasarkan atas peraturan yang ada maupun berdasarkan atas kesepakatan bersama, dalam memanfaatkan hasil-hasil (berupa uang) UP dibagi ke dalam berbagai pos penerima, seperti untuk: pengelola UP, pengusus sekolah, tenaga UP, administrasi, dan lain-lain yang besarnya (secara prosentasi) berbeda-beda.

## B. VISI UNIT PRODUKSI

Pada tahun 2020 yang akan datang merupakan era globalisasi pada semua sektor kehidupan, baik kehidupan manusia secara pribadi maupun masyarakat, kehidupan suatu bangsa dan negara (era industrialisasi), serta sktor-sektor lain yang menyebabkan terjadinya revolusi kehidupan, kelembagaan serta budaya masyarakat.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pada saat yang sama, dunia pendidikan menengah kejuruan akan dihadapkan berbagai tantangan dalam upaya mempersiapkan SDM yang memiliki berbagai keunggulan kompetitif (dalam pengertian mampu menembangkan kualitas dan tidak hanya sekedar mempertahankan kualitas yang sudah ada.

Berdasarkan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, PP Nomor 29 Tahun 1990 dan Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 beserta Nomor 080/U/1993 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya SMK untuk mengantisipasi dan sekaligus mendorong terciptanya nuansa pendidikan yang fleksible dan adaptif sebagai pencetak tenaga kerja yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta mampu mengantisipasi dan menyesuaikan tuntutan segala jaman.

Tuntutan di jaman industrialisasi misalnya, sikap fleksibel dan adaptif sistem pendidikan antara lain dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk program, kegiatan pembelajaran, serta peranan (dalam bentuk tanggung jawab) dunia usaha/industri/instansi lain mutlak diperlukan. Terlebih dibarengi dengan adanya berbagai deregulasi dan debirokrasi pemerintah dalam berbagai sektor, maka dampaknya secara umum akan mempengaruhi proses pendidikan secara komprehensif. Ditinjau secara eksternal, di era pasar bebas nantinya berbagai negara lain akan sangat dimungkinkan untuk berlomba menanamkan investasi di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan usaha. Di sisi lain, secara intern Indonesia harus berani bersaing dalam upaya mensejajarkan (bila mungkin lebih baik) dengan negara lain mengisi pembangunan nasional.

Kemudian untuk melihat visi pendidikan di Indonesia di masa datang pada umumnya, dan visi Sekolah Menengah Kejuruan khususnya diperlukan seperangkat data dan informasi SMK di masa sekarang (*condition of being*) serta data dan informasi lain yang erat kaitannya dengan kondisi di luar sistem pendidikan. Hal tersebut penting untuk diketahui agar pandangan atau visi yang diprediksikan dalam sistem pendidikan umumnya dan di STM khususnya sesuai dengan tuntutan jaman.

Visi STM di masa datang adalah merupakan gambaran ideal suatu sistem pendidikan tingkat menengah kejuruan. Gambaran ideal tersebut, STM

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

akan memiliki berbagai ciri atau karakteristik yang ideal pula sebagai suatu sistem pendidikan yang "sempurna".

Sementara itu kondisi STM yang ada sekarang ini meskipun telah didukung oleh seperangkat alat ("baca peraturan"), akan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan tingkat pelaksanannya. Oleh karena secara sistem kondisi ini banyak disebabkan oleh berbagai faktor komponen yang ada di dalamnya.

Sekolah Teknologi Menengah yang merupakan lembaga pendidikan kejuruan Bidang Teknologi dan Industri tingkat menengah diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja ahli tingkat menengah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Harapan tersebut antara lain diupayakan oleh sekolah mampu membantu pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikannya. Bentuk bantuan yang diharapkan adalah pencarian sumber daya (biaya) sebagai tambahan biaya operasionalisasi pendidikan. Oleh karenanya dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 pasal 29 ayat (2) dan Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 memberikan kesempatan kepada STM untuk menyelenggarakan Unit Produksi (UP) secara profesional. Namun demikian kondisi penyelenggaraan UP di STM khususnya dan SMK umumnya belum sesuai dengan yang diharapkan tersebut.

Unit Produksi adalah merupakan kegiatan usaha di sekolah yang sementara ini diharapkan untuk mengoptimalisasikan sumber daya sekolah. Namun demikian selama ini yang ada menunjukkan tidak setiap STM mampu menyelenggarakan UP seperti yang diharapkan. Sedangkan yang sudah menyelenggarakanpun juga belum optimal, yaitu masih bersifat "terpaksa" (atau bahkan dengan konsep "aji mumpung" ataupun "apa adanya". Dengan kata lain, sekolah belum profesional untuk mengembangkan suatu usaha untuk suatu alternatip mengembangkan pendidikan. Menurut Otjo (1995), beberapa hal yang menyebabkan kondisi pelaksanaan UP demikian itu adalah:

(a) belum didukung adanya situasi sistem sekolah dan lingkungan yang memadai

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

| UP SEKARANG | Komponen ----------> | VISI UP MASA DATANG |
|---|---|---|
| UU No 2 Th 1989 | - Dasar Hukum | UU No 2 Th 1989 |
| PP No 29 Th 1990 | | PP No 29 Th 1990 |
| Kepmendikbud No 0490/U/1992 | | Kepmendikbud No 0490/U/1992 |
| Kepmendikbud No 080/U/1993 | | Kepmendikbud No 080/U/1993 |
| Kepmendikbud No 0873/P/1986 | | Kepmendikbud No 0873/P/1986 |
| Kep.Dirjen Dikdasmen No 294/C/Kep/R.86 | | Kep.Dirjen Dikdasmen No 294/C/Kep/R.86 |
| Kep.Ber.Mendikbud&MenKop No 5151/M/KPTS/III/84 | | Kep.Ber.Mendikbud&MenKop No 5151/M/KPTS/III/84 |
| Koperasi | - Badan Usaha | Perseroan Terbatas |
| Produk dan Jasa | - Jenis Usaha | Produk dan Jasa |
| Intern dan Ekstern | - Segment Pasar | Intern dan Ekstern |
| Perangkat Keras dan Lunak milik Sekolah | - Fasilitas | Milik Yayasan |
| Warga sekolah | - SDM | Profesional |
| Modal Tetap, Kerja, Penggajian, dll | - Finansial | Modal tetap, kerja, penggajian, dll |
| Integrated Sekolah | - Manajemen | Otonom/terpisah dengan sekolah |
| Belum nampak | - Kerjasama | Kemitraan, aliasnsi strategi |

**Gambar 2. Kondisi sekarang dan visi mendatang UP di STM**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(b) kultur sekolah/SDM yang belum memadai (kurang inovatif produktif, profil, etika dan perilaku guru bukan sebagai pengusaha, pemahaman pasar kurang)

(c) organisasi sekolah (supra dan infra struktur) belum mendukung usaha.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang berhubungan visi STM di masa datang menunjukkan bahwa kegiatan Unit Produksi di STM akan dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila dikelola secara profesional sebagai suatu usaha, bukan dikelola hanya sebagai sampingan.

Dari kenyataan tersebut mendorong untuk diberikan suatu strategi-strategi tertentu sebagai upaya mencapai visi UP di STM seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi UP di STM masa datang (sebagai visi) dapat ditunjukkan seperti yang terlihat pada Gambar 2.

**1. Dasar Hukum**

Unit Produksi (UP) sebagai suatu usaha di sekolah (STM) masa datang secara yuridis antara lain didasarkan atas beberapa peraturan, yaitu:

(a) SK Mendikbud Nomor 0873/P/1986, tanggal 20 Desember 1986 tentang Pemanfaatan Hasil Praktek;

(b) SK Dirjen Dikdasmen Nomor 294/C/Kep/R/86, tanggal 30 Desember 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Hasil Produksi;

(c) SK Bersama Mendikbud dan Menteri Koperasi Nomor 158/P/1986 dan Nomor 5151/M/KPTA/III/84 tanggal 22 Maret 1984 tentang Pola Dasar Pembinaan Perkoperasian;

(d) Kurikulum PMK tahun 1984 yang menyangkut kegiatan praktek Intra, Ko, dan Ekstra Kurikuler;

(e) Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK;

(f) Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang SMK; dll



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

**2. Jenis Usaha:**

Adapun penyelenggaraan usaha termasuk jenis-jenis usaha yang dijalankan seyogyanya adalah:

(a) Produksi, baik bersifat reguler, produksi standar, atau pesanan.

(b) Jasa, baik bersifat servis perawatan, jasa penyewanaan fasilitas, maupun lainnya

Jenis usaha yang bersifat produksi reguler adalah UP yang mengacu kurikulum sekolah dan hasilnya dapat dipasarkan kepada masyarakat. Produksi standar atau sering disebut pula dengan produksi yang terus menerus adalah merupakan pembuatan barang dengan kualitas dan standar tertentu (tinggi) yang sudah memiliki jaringan pasar yang pasti, baik dipasarkan secara sendiri ataupun melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Sedangkan produksi pesanan adalah pembuatan barang yang dikerjakan berdasarkan order atau pesanan dari konsumen. Keterlibatan siswa di sini pada dasarnya dapat pada semua jenis produksi, akan tetapi sangat ditentukan oleh tingkat kesulitan produksi yang ada. Dan yang pasti siswa terlibat terutama pada produk reguler untuk semua tingkatan.

Kemudian jenis usaha jasa yang bersifat servis perawatan adalah usaha pelayanan kepada konsumen dalam bidang otomotif, elektronika, elektro, mesin, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan jasa penyewaan fasilitas diarahkan pada penyewaaan sarana dan pra sarana sekolah yang layak untuk disewakan kepada konsumen, seperti pergedungan, peralatan khusus, dan sebagainya.

**3. Tujuan didirikannya UP:**

Tujuan didirikannya UP di sekolah antara lain:

(a) untuk meningkatkan kualitas tamatan dalam berbagai segi terutama dalam hal pengetahuan dan ketrampilan

(b) sebagai sarana praktek kerja langsung siswa

(c) membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya pendidikan lainnya



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(d) menambah semangat kebersamaan

(e) untuk mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan praktek siswa

(f) melatih keberanian resiko yang diperhitungkan

(g) mendukung pelaksanaan dan pencapaian Pendidikan Sekolah Seutuhnya

(h) memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk mengerjakan pekerjaan praktek yang berorientasi pasar

(i) meningkatkan kreativitas siswa dan guru

(j) menumbuhkan sikap profesional produktif pada siswa dan guru

(k) melatih siswa untuk tidak tergantung kepada orang lain

(l) sebagai wadah PSG bagi siswa yang tidak mendapatkan tempat pelatihan

(m) menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha/industri atau masyarakat lain atas terbukanya fasilitas untuk umum dan hasil-hasil produksinya

(n) meningkatkan kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler siswa.

Setiap STM harus mendirikan dan mengembangkan UP karena:

(a) UP di samping dapat meningkatkan mutu lulusan melalui pembinaan kejuruan, juga dapat merubah sikap perilaku seperti cinta pada pekerjaan

(b) pada setiap STM tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi sesuai dengan jenis sekolah yang bersangkutan

(c) dengan adanya UP akan memberikan nilai tambah bagi sekolah

(d) dengan adanya UP maka para siswa dan guru akan terbawa pada standard nilai pasar/industri, yang sekaligus akan terbawa pada pola pikir dan perilaku yang berwawasan bisnis

(e) ketersediaan dana dari pemerintah terbatas, sementara biaya pendidikan di STM tinggi



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

**4. Manfaat diselenggarakannya UP:**

Manfaat diselenggarakannya UP di sekolah antara lain:

**(a) Manfaat edukatif:**

- dapat meningkatkan pengetahuan siswa, guru, dan karyawan
- dapat meningkatkan ketrampilan siswa, guru, dan karyawan
- dapat meningkatkan kemampuan berorganisasi warga sekolah, ada usaha ada pelayanan
- melatih disiplin dan inisiatif
- melatih siswa dalam hal memberikan jasa pelayanan
- menambah intensitas belajar siswa
- membantu terselenggaranya PBM dengan lebih baik
- membantu pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda
- sebagai wahana pelatihan kejuruan, belajar sambil bekerja dan tempat magang bagi tamatan yang belum bekerja
- dapat mengiktui perkembangan IPTEK

**(b) Manfaat ekonomis bagi warga sekolah:**

- meningkatkan penghasilan bagi guru dan karyawan
- meningkatkan kesejahteraan bagi siswa, guru, dan karyawan
- lebih berani mengambil sikap ber-usaha yang diperhitungkan secara eknomis
- menurunkan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa
- menciptakan lapangan kerja bagi warga sekolah
- meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar sesuai tuntutan dunia kerja

**(c) Manfaat ekonomis bagi sekolah:**

- meningkatkan pendapatan sekolah menuju kearah mandiri
- meningkatkan ketrampilan warga sekolah untuk memproduksi barang/jasa



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- menambah biaya perawatan fasilitas sekolah
- menambah biaya operasional pendidikan (PBM praktek) di sekolah
- dapat menambah jumlah fasilitas belajar mengajar di sekolah

Untuk mencapai tujuan dan tingkat kemanfaatan dengan diselenggarakannya UP di sekolah antara lain sekolah seyogyanya mengusahakan:

(a) adanya kelembagaan UP yang jelas, baik menyangkut struktur organisasi maupun job diskripsinya (termasuk di dalamnya terdapat kelompok kerja (Pokja) khusus yang menangani UP sekolah) maupun manajemen yang memadai

(b) adanya tenaga kerja yang profesional dalam berbagai bidang sesuai dengan jurusan/program studi yang ada di sekolah

(c) sosialisasi UP kepada warga sekolah dan di luar sekolah (masyarakat)

(d) adanya wawasan ekonomi, bisnis, dan wirausaha bagi semua warga sekolah

(e) adanya dorongan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait selaras dengan penyelenggaraan UP di sekolah, seperti Depdikbud (Dikmas), Kadin, Depkop, Deprind, baik dalam bentuk penataran, seminar, instruksi, studi banding, dan sebagainya.

(f) dengan melibatkan semua warga sekolah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan UP di sekolah, di samping ada pengelola pokok.

(g) dengan menambah fasilitas sekolah sesuai keperluan dan kemampuan sekolah

(h) melakukan evaluasi secara kontinyu untuk keperluan perbaikan program dan pelaksanaan selanjutnya

Kemudian agar pelaksanaan kegiatan UP sinkron dan dapat meningkatkan PBM di sekolah, maka seharusnya dilakukan upaya antara lain:

(a) melakukan inventarisasi berbagai program UP dan materi PBM sekolah

(b) pengaturan jadwal, penambahan jam belajar-mengajar, dan lain-lain minimal mengacu pada alokasi waktu yang ada pada kurikulum STM



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(c) pengelolaan (manajemen) UP dilakukan tersendiri, di luar manajemen PBM sekolah

(d) pelaksanaan kegiatan UP juga memanfaatkan waktu di luar jam efektif sekolah

(e) program atau kegiatan usaha yang diselenggarakan minimal sesuai dengan program studi yang ada di sekolah

Dengan demikian, keberadaan UP di sekolah dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah, baik Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas (perangkat lunak dan keras), dan sumber daya lainnya (lingkungan sekolah) untuk lebih produktif. Sehingga sekolah dan warga sekolah dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis maupun non ekonomis.

**5. Model penyelenggaraan UP dan Jenis Usaha di Masa Datang**

Secara umum dan ditinjau dari yuridis formal, maka model penyelenggaraan UP di STM untuk masa yang akan datang sebaiknya adalah sebagai replika industri yang kedudukannya ada di sekolah, sehingga sekolah memiliki perusahaan di bawah langsung Departemen P dan K (dalam hal ini Kanwil P dan K setempat).

Model ini UP dikelola secara sendiri oleh suatu sistem usaha profesional yang secara fungsional tidak terikat oleh sistem sekolah yang ada. Akan tetapi merupakan mitra sekolah dalam mengembangkan pendidikan yang sekaligus mencari keuntungan untuk sekolah. Dengan demikian memiliki kesejajaran dengan sistem sekolah, hanya tugasnya yang berbeda. UP bertugas untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan pendidikan, sedangkan sistem sekolah bertugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Model ini secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 beserta uraiannya.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

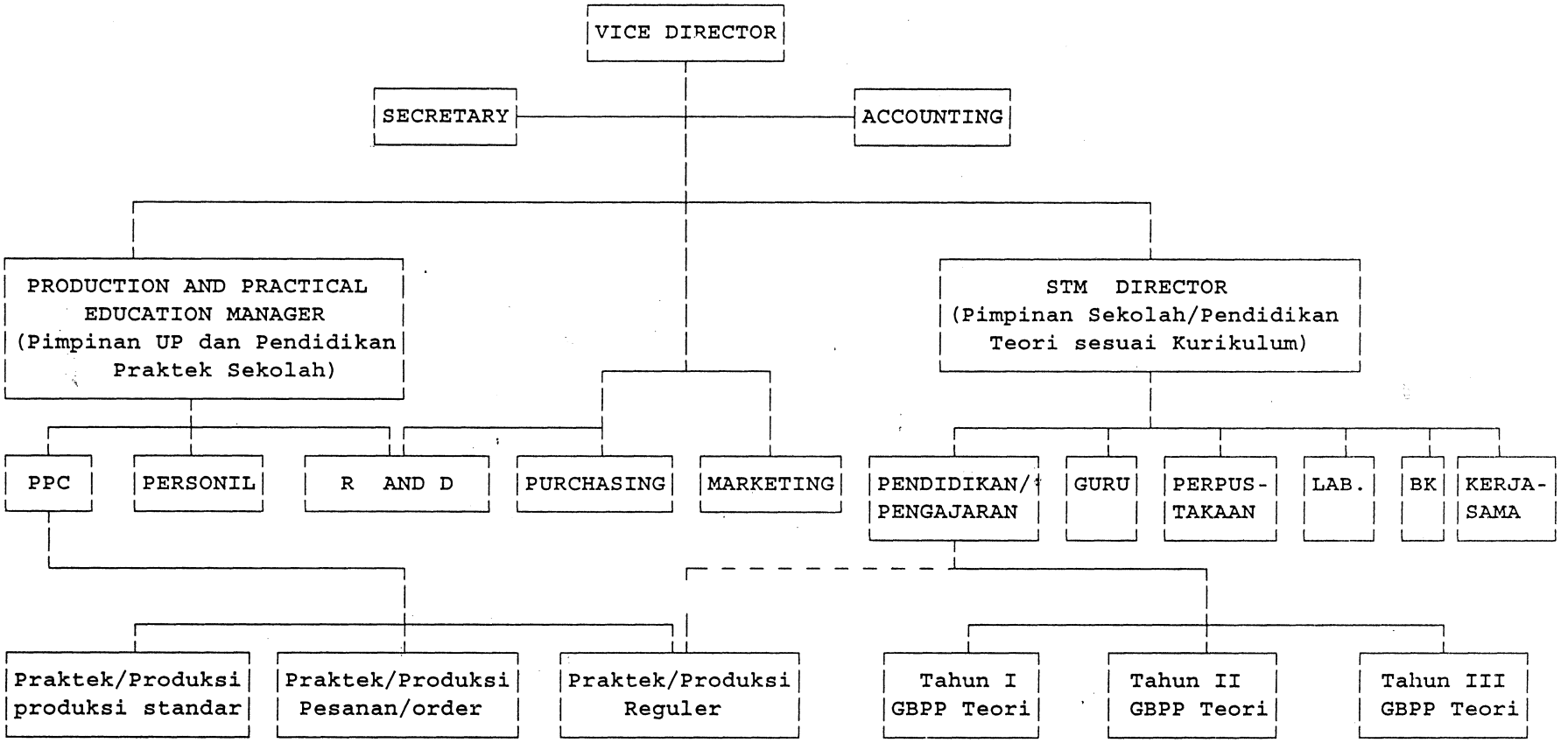


Gambar 3. Skema Organisasi Sekolah dan Unit Produksi Sekolah (STM)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

**6. Struktur organisasi dan job discription:**

Seperti nampak pada Gambar 3 bahwa untuk masa datang secara operasional sistem organisasi unit produksi adalah terlepas dari sistem sekolah secara khusus. Namun berdasarkan struktur organisasi pendidikan, maka UP integrated dengan sistem sekolah yang ada.

Secara garis besar terdapat dua sistem operasional, yaitu sistem pengajaran teori yang berada di bawah langsung naungan pimpinan sekolah, dan sistem unti produksi yang membawahi dua bidang operasional, yaitu praktek/produksi reguler dan praktek/produksi standar maupun pesana konsumen. Semua itu di bawah langsung Vice Director yang bertanggung jawab penuh terhadap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dimana dalam hal ini dapat diduduki oleh pimpinan Kanwil P dan K setempat. Sedangkan manager produksi/praktek dapat dijabat oleh orang profesional dalam bidang usaha.

Tugas Vice Director adalah untuk menyelenggarakan sekolah sekaligus usaha (UP) di sekolah tersebut yang berjalan secara bersamaan. Manager produksi dan Pimpinan sekolah bertanggung jawab kepada Vice Director. Untuk kelancaran penyelenggaraan Usaha dan pendidikan, maka Vice Director dibantu administratur dan accounting serta departemen purchasing dan marketing.

Kepala produksi (Manager produksi) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan usaha produksi/jasa secara mandiri, yang dilengkapi dengan beberapa departemen/bidang seperti PPC (Planning Production Control), ketenagaan/personil, Research and development (R and D), da lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian untuk Kepala sekolah/pendidikan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar teori sesuai dengan kurikulum yang ada yang dikeluarkan oleh Departemen P dan K. Untuk membantu pelaksanaan pendidikan teori ini juga dilengkapi beberapa bagian seperti bagian pendidikan dan pengajaran, guru dan karyawan, laboratorium, perpustakaan, Bimbingan dan Konseling, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dengan demikian pada sistem ini terdapat karyawan khusus sebagai pelaksana usaha (UP) yang bekerja secara profesional untuk memproduksi barang atau ahli dalam bidang-bidang jasa/maintenance. Di samping itu, dilengkapi dengan fasilitas bengkel dua macam, yaitu bengkel untuk usaha murni dan bengkel untuk kegiatan praktek/produksi reguler oleh siswa.

**1) PPC (Planning Production Control)**

Departemen ini terutama bertugas pada tiga bidang pokok yaitu, untuk:

a) merencanakan kegiatan praktek reguler siswa sesuai dengan kurikulum pendidikan. Tugas ini dilakukan dengan koordinasi pada bagian pendidikan dan pengajaran teori.

b) merencanakan produksi standar sampai dengan pelaksanaannya untuk dijual/dipasarkan terus menerus dengan bekerjasama dunia usaha/industri

c) menerima pesanan konsumen suatu barang/jasa tertentu, kemudian direncanakan sampai dengan hasil jadi.

**2) Pimpinan Sekolah (STM Director)**

Pada dasarnya tugas pokok adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran teori yang mengacu kurikulum, serta melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak Manager Produksi (khususnya Departemen PPC) dalam merencanakan kegiatan praktek reguler siswa atau kemungkinan praktek siswa untuk mengerjakan produksi pesanan dan bahkan mungkin produksi sandar pada bagian-bagian tertentu.

**3) Program Pembelajaran Praktek Produktif**

Untuk lebih jelasnya, maka program pembelajaran khususnya praktek yang bersifat produktif di STM dapat dilihat pada Gambar 4. Seperti terlihat pada gambar 4, bahwa untuk proses pembelajaran parktek siswa dilakukan dan diatur semuanya oleh departemen PPC, yaitu sekalgus diselaraskan dengan kepentingan produksi pada bagian unti produksi dengan sejauh mungkin tidak menyimpang dari kurikulum.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

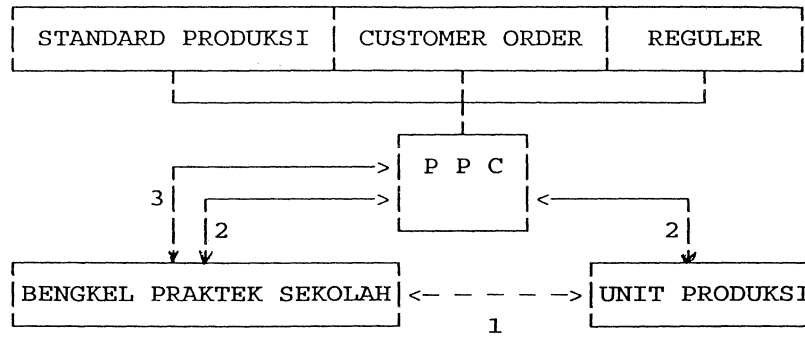


Gambar 4. Program pembelajaran praktek produktif
(Adopsi dari Program Pembelajaran Praktek STM Mikael Surakarta: 1996)

Keterangan:
1 = - - - - : Konsultatif/kerjasama pembelajaran
2 = ———— : Order/Job dan hasil produksi standar
3 = ———— : Input GBPP

Sedangkan untuk kegiatan produksi yang bersifat standar maupun pesanan dari luar, maka PPC juga yang mengatur. Dengan demikian akan dicapai suatu pembelajaran siswa yang benar-benar membutuhkan ketrampilan, ketelitian, akurasi, dan lain-lain sesuai dengan standar produksi sebagaimana halnya di dunia usaha/industri. Beberapa keuntungan pokok yang diperoleh dengan sistem ini, antara lain: (a) tujuan sekolah akan tercapai untuk membekali siswa yang trampil, (b) kegiatan UP tetap jalan sebagaimana suatu usaha profesional.

## 7. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana halnya usaha profesional di industri, maka UP di STM masa datang mutlak diperlukan adanya tenaga-tenaga yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa untuk UP di STM masa datang harus dikelola secara mandiri, dimana hubungannya dengan STM dikoordinasikan oleh Departemen atau bagian PPC. Oleh karena itu kebutuhan tenaga untuk operasionalisasi UP dibedakan menjadi dua. Pertama , adalah tenaga-tenaga khusus sebagai karyawan UP yang diambilkan dari para ahlinya masing-masing (baik jumlah maupun jenis dan kualifikasinya tergantung jenis dan bidang usahanya). Kedua, adalah tenaga yang diambilkan dari guru-guru atau siswa-siswa STM, dimana dalam pengerjaan job-nya sejauh mungkin disesuaikan dengan kurikulum atau tergantung pada pesanan/order konsumen.

Dengan demikian peranan warga sekolah (khususnya guru yang sebagai profesinya adalah mengajar dan mendidik) dimasa datang peranannya di dalam UP benar-benar dibatasi pada mereka yang memiliki jiwa bisnis. Tujuan sekolah melalui UP untuk meningkatkan ketrampilan siswa di sini akan tercapai karena diatur sedemikian rupa, baik keterlibatannya dalam produksi standar, pesanan, maupun reguler. Sedangkan tujuan sekolah untuk meningkatkan pendapatan sekolah, maka melalui UP yang dikelola secara profesional ini akan tercapai pula.

## 8. Sarana dan Pra Sarana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kebutuhan sarana dan pra sarana UP di masa datang sangat diutamakan sebagaimana halnya yang ada di dunia usaha/industri. Artinya, fasilitas untuk operasionalisasi UP dibedakan menjadi dua bagian pokok, yaitu:

a. Fasilitas berupa bengkel atau sejenisnya minimal disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. Gunanya adalah untuk kepentingan praktek siswa dalam pengerjaan/pembelajaran produktif reguler (sesuai kurikulum).
b. Fasilitas berupa bengkel atau sejenisnya yang dipergunakan untuk kepentingan proses produksi, baik untuk produksi standar maupun pesanan/order dari konsumen. Untuk kepentingan ini baik jumlah maupun jenisnya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dalam UP.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Bilamana usaha yang dijalankan adalah jenis produksi, maka fasilitas yang dipergunakan cenderung juga alat-alat produksi, seperti untuk pengerjaan dasar sampai dengan yang canggih. Umpamanya untuk produksi permesinan, beberapa peralatan yang disediakan antara lain peralatan: *cuting, punching, bending, welding, painting, CAD, CAM, grinding, asembling, drilling, shaping, turning, milling. measuring, drawing, packing* dan sebagainya.

Sedangkan apabila usaha yang dijalankan adalah bersifat jasa *maintenance*, maka peralatan yang dibutuhkan adalah alat-alat khusus (*service special tools/SST*), baik untuk jenis usaha jasa perbengkelan otomotip, elektronika, elektro, dan sebagainya.

**9. Pemasaran**

Sebagaimana halnya suatu perusahaan/industri, kunci keberhasilan usaha produksi maupun jasa sangat ditentukan pula oleh pola pemasaran yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa datang suatu sekolah (STM) yang akan menyelenggarakan UP secara profesional juga harus membentuk suatu jaringan usaha (*network*) secara mapan. Mulai dari pemasok bahan, teknik dan produksi, pengontrolan kualitas, SDM, sampai dengan pemasaran harus dijalin sebaik mungkin sehingga produktivitas akan tetap berlangsung.

Misalnya untuk usaha jenis produksi, maka pemasaran produk antara lain dapat melalui kerjasama dengan dunia usaha/industri lain yang secara khusus memasarkan hasil produksi tersebut, terlebih untuk produksi standar yang memang secara terus menerus diproduksi. Sedangkan produksi yang dihasilkan dari reguler (karya siswa STM) juga harus dipasarkan secara integrasi dengan produksi standar, di samping dengan produksi yang didasarkan atas pesanan.

Namun demikiann pemasaran dapat sukses bilamana barang/jasa yang dipasarkan memiliki nilai kompetitif. Artinya, UP di STM bidang produksi/jasa nantinya harus memiliki kemampuan bersaing atau bahkan memiliki keunggu-



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

lan kompetitif. Beberapa bentuk pemasaran yang dapat ditempuh adalah melalui pameran/mengikuti pameran, penyebaran leaflet, kerjasama dengan media cetak/elektronik atau dunia usaha, lomba, dan sebagainya.

**10. Keterkaitan UP dengan PSG**

Dengan menggunakan model UP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana UP STM berdiri sendiri sebagai suatu perusahaan sejajar dengan sekolah di bawah naungan Departemen P dan K, maka apabila dikaitkan dengan program pemerintah tentang Pendidikan Sistem Ganda adalah sangat cocok sekali. Keuntungan model UP ini dikaitkan dengan PSG antara lain:

a. Siswa STM langsung bisa praktek mengerjakan barang/jasa atas pesanan/order konsumen maupun produksi standar. Untuk hal ini disesuaikan dengan tingkatan siswa terhadap tingkat kesulitan produk. Sehingga tetap mengacu pada kurikulum.

b. Pengaturan lama PSG maupun job-job yang dikerjakan, siswa langsung dapat masuk di UP secara fleksibel. Di sini siswa akan dihadapkan langsung pada pekerjaan-pekerjaan nyata, karena yang dikerjakan diutamakan pada produk standar atau pesanan konsumen.
c. Sekolah tidak perlu mencarikan industri lain di luar sekolah, karena telah memiliki hubungan tetap dan ikut memiliki UP, sehingga efisien dalam hal biaya.
d. Siswa akan memiliki keuntungan ketrampilan plus dari kurikulum, karena akan mengerjakan job-job dari awal sampai dengan perakitan/finishing.

Secara skematis program Pendidikan Sistem Ganda STM di masa datang dapat dilihat pada Gambar 5.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

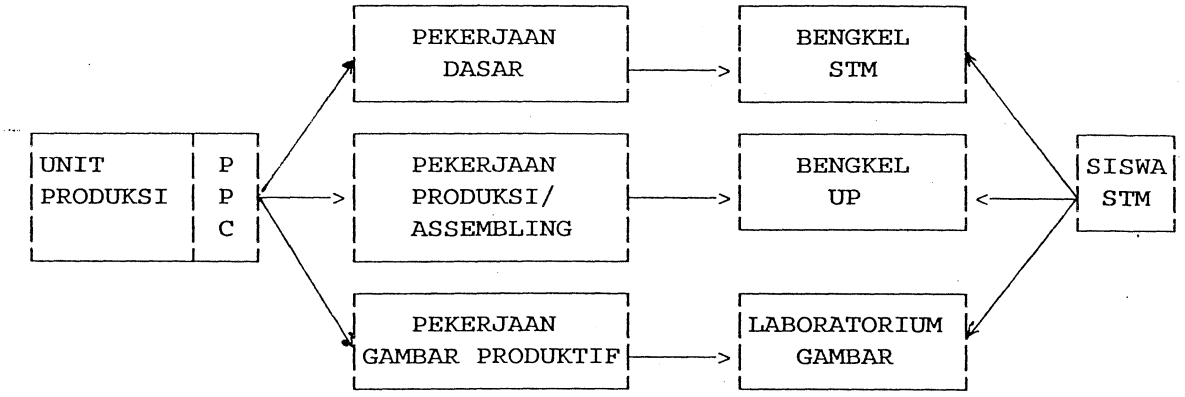


**Gambar 5. Skema Program Pendidikan Sistem Ganda STM Masa Datang (Adopsi Program PSG STM Mikael Surakarta: 1996)**

Pada Gambar 5 nampak bahwa program PSG di STM masa datang dapat berjalan dengan baik apabila UP dapat berjalan secara profesional. Dimana program PSG STM akan integreted dengan program kerja yang ada di UP. Untuk pekerjaan-pekerjaan dasar, siswa STM dapat melakukan di bengkelnya sendiri dengan materi mengacu kurikulum atau atas perintah dari UP (PPC). Pada pekerjaan produksi dan assembling, UP (PPC) juga dapat memberikan perintah kepada siswa STM untuk ikut mengerjakan, terutama pada siswa tingkat akhir. Atau sebaliknya bahwa program praktek reguler siswa dapat diarahkan (disesuaikan) dengan pesanan yang ada di UP. Di sini pekerjaan tersbut khusus hanya dikerjakan di bengkel UP. Sedangkan untuk pekerjaan gambar yang bersifat bukan latihan, akan tetapi gambar-gambar produktif, dapat dikerjakan oleh siswa STM maupun bersama-sama dengan tenaga ahli gambar di UP.

Dengan demikian siswa dalam melaksanakan PSG akan langsung merasakan dan menjalankan pekerjaan berbagai tingkat kesulitan, baik di bengkel sekolah maupun bengkel UP.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# BAB V
# SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tentang potret pelaksanaan dan visi Unit Produksi di STM, maka dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

## A. Simpulan

1. Potret Pelaksanaan Unit Produksi di STM:

a. Pemahaman warga sekolah tentang UP masih kurang dan pemasyarakatannya belum sampai pada tingkatan yang diharapkan, yaitu belum mengarah pada pemasyarakatan usaha sebagaimana mestinya.

b. Kegiatan UP belum direncanakan dengan baik, masih berjalan secara insedental.

c. Hambatan dominan yang muncul adalah dari faktor SDM yang kurang profesional sebagai pengusaha (kultur, profesi, orientasi).

d. Model-model penyelenggaraan UP di sekolah antara lain:

1) Model badan usaha milik sekolah yang berdiri sendiri, akan tetapi masih terikat dengan sekolah dalam hal perlindungan, hasildan keuntungan, dan pengembangan.

2) Berdasarkan jenis usahanya maka model-model UP yang ada antara lain model untuk usaha manufacturing dengan model reguler, pesanan dan sub kontrak. Sedangkan jenis usaha jasa, kegiatan yang banyak dilakukan dalam UP adalah dengan **model latihan/magang** dan **model maintenance (layanan perawatan)**.

e. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal: dasar hukum, badan hukum, analisa usaha, fasilitas (sebagian kecil), manajemen, keterlibatan dunia usaha/masyarakat, modal, dan pemasaran.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Visi Unit Produksi di STM Masa Datang:

a. Model penyelenggaraan UP di STM untuk masa yang akan datang adalah model replika industri yang kedudukannya ada dan sejajar dengan sekolah, sehingga sekolah memiliki perusahaan di bawah langsung Departemen P dan K (dalam hal ini Kanwil P dan K setempat). Model ini UP dikelola secara sendiri oleh suatu sistem usaha profesional yang secara fungsional tidak terikat oleh sistem sekolah yang ada.

b. Jenis usahanya antara lain produksi maupun jasa. Jenis produksi dapat bersifat reguler, produksi standar, dan pesanan/order.

c. Fasilitas yang dipergunakan meliputi perangkat keras dan lunak untuk kepentingan produksi dasar sampai dengan yang canggih. Fasilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas untuk produksi reguler oleh sekolah, dan fasilitas untuk produksi standar dan pesanan oleh UP.

d. Sumber Daya Manusia menggunakan para ahli/profesional dalam bidang pekerjaan/usaha, jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan jenis dan kapasitas usahanya.

e. Program PSG akan efisien dan sangat ditunjang dengan model UP yang dikelola mandiri dan profesional.

## B. Saran Kebijakan

1. Diusahakan adanya dasar hukum yang mengatur pendirian, pelaksanaan, dan pengembangan UP sekolah
2. UP dijalankan dengan berbadan hukum yang pasti
3. Peningkatan jenis-jenis usaha yang lebih bervariatif
4. Fasilitas UP secara kuantitas maupun kualitas diperbaiki/ditambah sesuai bidang usahanya
5. Pengelolaan UP diarahkan yang profesional management
6. Menjalin kerjasama dengan pihak luar/dunia usaha



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. Perlu peningkatan SDM ke arah bisnisman/usahawan.
8. Dibentuk UP sebagai replika industri yang sejajar dengan sekolah (STM)
9. Dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, utamanya tentang strategi-strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mengangkat/merubah model UP yang ada sekarang ke arah model UP di masa datang yang lebih baik dan profesional.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

## DAFTAR PUSTAKA


Beny Suprapto (1989). *Pendidikan Sekolah Seutuhnya.* Jakarta: Depdikbud.

Boediono (1991). *Pengaruh pergeseran struktural terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan dalam periode tinggal landas.* Jakarta: Balitbang Dikbud.

Depdikbud (1990 a). *Program pengembangan pendidikan menengah kejuruan dalam Pelita V.* Jakarta: Dirjen Dikdasmen Dikmenjur.

Depdikbud (1994). *Konsep Sistem Ganda pada SMK di Indonesia.* Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud (1993). *Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 Tentang SMK* Jakarta: Depdikbud.

------- (1987). *Panduan belajar ke sekolah menengah kejuruan tingkat atas (SMKTA).* Jakarta: Dirjen Dikdasmen- Dikmenjur.

------- (1990 b). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud (1993). *Kepmendikbud No. 080/U/1993 Tentang Kurikulum SMK.* Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud (1993). *Link and match.* Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud (1993). *Informasi pendidikan menengah kejuruan.* Jakarta: Depdikbud.

Engkoswara. (1987). *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan.* Jakarta: PPLPTK Ditjen Dikti Depdikbud

Evans, Rupet N. (1971). *Foundation of vocational education.* Colombus, Ohio: Charless E. Merril Publishing Co.

Karol, HN and Ginsburg, SG. (1980). *Managing The Higher Education Enterprise.* New York: John Willey and Sons Inc.

Muhammadi (1990). *IPTEK dan tenaga kerja pada PJPT II.* Makalah disampaikan pada seminar IV TNI AD di Bandung, Tanggal 18 Desember 1990.

Miller melvin D. (1986). *Principles and a philosophy for vocational education.* Colombus-Ohio: NCRVE.




Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Slamet PH. (1995). *Pelatihan sebagai salah satu sistem pembinaan SDM*. Makalah seminar sehari tentang Pelatihan Pemagangan Bagi Para Pengusaha, Asosiasi profesi dan Instansi Teknis se DI Yogyakarta, Agustus 1995.

Slamet PH. (1995). *Strategi pelaksanaan PSG pada sekolah menengah kejuruan*. Makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Gebyar PMK di Yogyakarta, Tanggal 11 Agustus 1995.

Slamet PH. (1995). *Restrukturisasi dan rekulturisasi pendidikan kejuruan*. Makalah disampaikan pada seminar sehari di FPTK IKIP Yogyakarta, Agustus 1995.

Slamet PH. (1995). *Sistem ganda dan orientasi baru PMK teknik*. Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Vocational Training in the year 2000: NTVET and the Role of the MOI, Tanggal 5 September 1995 di Jakarta.

Slamet PH. (1995). *Pelaksanaan peran dan fungsi organisasi kelembagaan pendukung PSG*. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional tentang : Memantapkan Peran MPK Dalam pelaksanaan PSG pada SMK di Jakarta, Tanggal 21 Agustus 1995.

Slamet PH. (1995). *Pengembangan SMK unggul*. (Makalah).

Wenrich, Ralph C. and Wenrich, William J. (1974). *Leadership in administration of vocational education*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.

Wardiman Djojonegoro. (1993). *Link and match sebagai kebijakan dasar pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia*. Makalah disampaikan di Lokakarya Pendidikan Kejuruan ICMI-UMY, 3 Juli 1993.

Wiroreno, Otjo N. (1995). *Pemikiran kearah peningkatan perkembangan unit produksi melalui pelaksanaan TEDP*. Jakarta: Depdikbud.



Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF

H a r i/Tanggal : Senin, 25 Maret 1998
W a k t u : 12.30 - Selesai
Tempat : R.M 1 Blok Mesin FPTK
A c a r a : Seminar pra proposal penelitian
Visi Model-model Penyelenggaraan UP.
di SMK DIY oleh Drs. Martubi, MPd.,dkk.

| No. | N a m a | N I P | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H.A.Tasliman, M.Ed. | 130367416 | 1. ..... |
| 2. | Drs. Wardan Suyanto, MA. | 130683449 | 2. ..... |
| 3. | Drs. Sukoco, M.Pd. | 130530822 | 3. ..... |
| 4. | Drs. Noto Widodo | 130515051 | 4. ..... |
| 5. | Drs. Tawarjono, Us., M.Pd. | 130684187 | 5. ..... |
| 6. | Drs. Satunggalno, M.Pd. | 130799876 | 6. ..... |
| 7. | Drs. Herminarto, Sf.,M.Pd. | 130681037 | 7. ..... |
| 8. | Drs. Agus Budiman, M.Pd. | 131126240 | 8. ..... |
| 9. | Drs. Lilik Chaerul Yuswono | 131282355 | 9. ..... |
| 10. | Drs. Budi Tri Siswanto,M.Pd | 131453192 | 10. ..... |
| 11. | Drs. Martubi, M.Pd. | 131453198 | 11. ..... |
| 12. | Drs. Agus Partawibawa | 131453202 | 12. ..... |
| 13. | Drs. Sudiyanto | 131453191 | 13. ..... |
| 14. | Drs. Sukaswanto | 131474320 | 14. ..... |
| 15. | Drs. Kir Haryono, M.Pd. | 131570311 | 15. ..... |
| 16. | Drs. Moch Solikin | 132 | 16. ..... |
| 17. | Drs. Suhartanta | 132048514 | 17. ..... |

Yogyakarta,

Jurusan Diknik Otomotif
K e t u a

Drs. Satunggalno, M.Pd.

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA
**LEMBAGA PENELITIAN**
Alamat: Karangmalang , Yogyakarta. 55281. Telp. 0274 586168 Fax. 0274 565500

# LAPORAN PELAKSANAAN SEMINAR INSTRUMEN/DESAIN PENELITIAN

1. Nama Peneliti : Drs. Mantubi, MPd, dkk
2. Jurusan : Teknik Otomotif
3. Fakultas : FPTK
4. Status Penelitian : a. Mandiri
   b. Kelompok
   c. Latihan
   d. Lain-lain
5. Judul Penelitian : Visi model-model UP di SMK di DIY
6. Pelaksanaan : Tanggal : 30 Sept 1998
   Jam : 14.20
7. Tempat : RM 2, FPTK-IKIP YK
8. Dipimpin oleh : Ketua : B. KARTOWAGIRAH, MPd
   Sekretaris : .....
9. Peserta : a. Konsultan : 1 orang
   b. Nara Sumber : 1 orang
   c. BPP : 2 orang
   d. Peserta lain : 13 orang
   Jumlah : 17 orang

*(daftar terlampir)*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

10. Hasil Seminar:

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan:

Instrumen/Desain Penelitian tersebut di atas:

a. Diterima, tanpa revisi/pembenahan
b. Diterima, dengan revisi/pembenahan
c. Dibenahi, untuk diseminarkan ulang.

11. Catatan:

- Instrumen yg menyajiring dan dobel barrel dibenahi
- Instrumen ditambah yg hal² yg berkaitan dengan pengelolaan kenangan
- Sampel dibatasi STM saja karena dananya sangat terbatas

| Sekretaris, | Mengetahui<br>Badan Pertimbangan<br>Penelitian, | Ketua Sidang, |
|---|---|---|
| (.....) | (B. KARTOWAGIRAN) | (B. KARTOWAGIRAN) |
| NIP. ..... | NIP. 130.693.812 | NIP. 130.693.812 |

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA
**LEMBAGA PENELITIAN**
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta. 55281. Telp. 0274 586168 Fax. 0274 565500

# DAFTAR HADIR SEMINAR PENELITIAN

ari, tanggal : Kamis, 19 Desember 1998
ama Peneliti : Drs. Martubi, MPd., dkk.
ak./Jurusan : FPTK / PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
udul Penelitian : VISI MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN UNIT PRODUKSI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
enis Seminar : ☐ USULAN ☐ INSTRUMEN ☒ LAPORAN HASIL

| No. | NAMA | GELAR | Tanda tangan |
|---|---|---|---|
| 01. | Haryanto | Drs. M.Pd. | 01. |
| 02. | Sutrisna Wibawa | Drs., M.Pd. | 02. |
| 03. | Wisnu Giyono | Drs., M.Pd. | 03. |
| 04. | Tawardjono Usman | Drs., M.Pd. | 04. |
| 05. | Sri Sudaryati | Dra., M.Si | 05. |
| 06. | Soepartp Rahmad Said | Drs | 06. |
| 07. | Farida Hanum, | Drs., M.Si | 07. |
| 08. | H. Yulipriyanto | Ir, M.S. | 08. |
| 09. | Sudiyono | Drs | 09. |
| 10. | Badrun Kartawagiran | Drs. M.Pd. | 10. |
| 11. | S. Wieni Septiarti | Drg. M.Si | 11. |
| 12. | Darmono | Drs | 12. |
| 13. | Sudarsono | Drs., M.Si | 13. |
| 14. | Herman Dwi Suryono | Drs., M.Sc. | 14. |
| 15. | Amat Jaedun | Drs., M.Pd. | 15. |
| 16. | Martubi | Drs., M.Pd. | 16. |
| 17. | Siti Partini | Dr. SU | 17. |
| 18. | Suryati Sidharta | Dra.M.A | 18. |
| 19. | Sudji Munadi | Drs.M.Pd. | 19. |
| 20. | Riaqie Auliana | Dra | 20. |
| 21. | Sarbiran | Dr. M.Ed. | 21. |
| 22. | | | 22. |
| 23. | | | 23. |
| 24. | | | 24. |
| 25. | | | 25. |

Yogyakarta, 19 Desember 1998
Pimpinan Sidang,

SUKAMTO, MSc., Ph.D.
NIP

Created with nitro professional
nitro PDF professional
Created with a trial version of nitro PDF professional online at nitropdf.com/professional